

# Membangun Kebangsaan Multikultural

**Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya**

Multikulturalisme Indonesia memiliki makna yang lebih dalam dari kemajemukan budaya. Untuk itu, semangat nasionalisme hendaknya dikedepankan dengan menekankan kesetaraan dan kesederajatan dalam bingkai kebangsaan atau Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Nusantara ibarat mozaik yang dirajut oleh aneka tenun kebangsaan yang terdiri atas ratusan suku bangsa (etnik) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan.

Ibarat dua sisi mata uang, selain sebagai khasanah kekayaan, kemajemukan juga bisa memicu gesekan antar etnik. Stigma sosial dan konflik terbuka berpotensi muncul jika kemajemukan tidak dikelola dengan harmonis atau dibiarkan berjalan tanpa arah.

**DANDRA**  
PUSTAKA INDONESIA

Jl. Kenanga 164 Sambilegi Baru Kidul  
Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta  
Telp. 0274-4332233

ISBN: 978-602-1638-64-2



9 786021 638641

Membangun Kebangsaan  
Multikultural

Teoritis, Praktis, dan  
Konteks Pengembangannya

Dr. Suharno, M.Si.

Dr. Suharno, M.Si.

# Membangun Kebangsaan Multikultural

**Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya**

Dr. SUHARNO, M.Si.

# **MEMBANGUN KEBANGSAAN MULTIKULTURAL**

Teoritis, Praktis, dan Konteks  
Pengembangannya

**MEMBANGUN KEBANGSAAN MULTIKULTURAL:  
Teoritis, Praktis, dan Konteks Pengembangannya**

Dr. Suharno, M.Si.

2016

*Hak cipta ada pada penerbit*

*All right reserved*

*Cetakan I, November 2016*

**Penyunting:**

Sismono La Ode, M.A.

**Tata Letak:**

Iswara NR

**Desain Sampul:**

Amir Fuadi

Yogyakarta, 2016

202 halaman; 15 x 23 cm

ISBN 978-602-1612-49-1

**Penerbit:**

Diandra Pustaka Indonesia

Jl. Kenanga No. 164, Sambilegi Baru Kidul,

Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55282

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>7</b>
<b>[1] PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
<b>[2] PENGUATAN KEBANGSAAN BERBASIS</b>	
<b>GERAKAN MAHASISWA.....</b>	<b>21</b>
Gerakan Mahasiswa dan Isu	
Kebangsaan.....	21
Pemuda dan Gerakan Kultural	
Bangsa.....	28
Gerakan Pemberdayaan dan Identitas	
Bangsa.....	37
Gerakan Mahasiswa dan Era	
Reformasi.....	44

Gerakan Reformasi.....	45
Gerakan Moral Kebangsaan.....	48
Keyakinan & Idealisme.....	50
Gerakan Mahasiswa dalam Konstruksi Indonesia Baru.....	52
<b>[3] MEMBANGUN KEBANGSAAN MULTIKULTURAL DARI BAWAH MELALUI PEMODELAN.....</b>	<b>59</b>
Akademisi.....	61
Praktisi.....	83
<b>[4] KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURALISME: MEMBANGUN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA UNTUK MENGUATKAN KEBANGSAAN.....</b>	<b>107</b>
Implikasi Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultur.....	114
Potret Komunikasi Lintas Budaya di Kalangan Mahasiswa.....	120
Proses Adaptasi Lintas Budaya dalam Masyarakat Multikultur.....	132
Kebangsaan Indonesia dalam Multikulturalisme.....	138

**[5] OPTIMALISASI RUANG-RUANG**

<b>AKADEMIK</b> .....	147
Ruang Pembelajaran.....	147
Organisasi Mahasiswa.....	155
Transformasi Nasionalisme.....	157
Sikap Nasionalisme.....	162
Pembelajaran Berbasis Nasionalisme....	165
Bentuk-bentuk Nasionalisme.....	167
Peran dan Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	169
Model-Model dalam Mentransformasi Nilai Nasionalisme.....	174
<b>REFERENSI</b> .....	185
<b>INDEKS</b> .....	195
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	201



# PENGANTAR EDITOR

**N**egara Indonesia adalah negeri yang multi-kultur, negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keberagaman dalam segala hal. Multikulturalisme di Indonesia pada dasarnya merupakan akibat dari kondisi sosial-budaya yang beraneka-macam dan faktor wilayah geografis yang sangat luas.

Maka dari itu, filosofi Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting sebagai landasan pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda namun tetap satu” terpatrit dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pancasila ibarat payung besar yang menaungi berbagai aspek pluralitas, baik ideologi, sosial, politik, agama, etnis, budaya, dan lainnya. Dengan Pancasila, seharusnya semakin menguatkan rasa kebangsaan, harmonisasi, serta terhindar dari segala bentuk konflik.

Namun, yang terjadi saat ini masih jauh panggang dari api. Gesekan horizontal tetap saja menjadi fenomena yang kerap kita temui.

Perbedaan yang seharusnya dimaknai sebagai anugerah dan bagian dari khasanah kekayaan justru dijadikan alasan untuk membenci bahkan memerangi saudara sebangsa dan setanah-air.

Generasi muda Indonesia telah kehilangan identitas kebangsaannya sebagai dampak gelombang kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi yang tidak mampu dipilah dan dipilih dengan baik.

Hal serupa tapi tak sama juga menerpa kaum yang lebih tua di mana mereka terlalu mudah tersulut amarah dan gampang terhasut oleh berbagai bentuk provokasi yang salah satunya seringkali mempersoalkan tentang perbedaan.

Buku ini tidak sekadar membahas kemajemukan budaya di Indonesia. Lebih dari itu, buku ini bisa menjadi pedoman untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada

generasi muda, aplikasi kehidupan dalam semangat kebangsaan, hingga mekanisme manajemen konflik yang berpotensi terjadi karena ketidakpahaman dalam memaknai multikulturalisme.

Akhir kalam, selamat membaca.

**Sismono La Ode, M.A.**

*Penyunting*



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau. Dari jumlah sebanyak itu, 7.870 pulau di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 lainnya belum bernama. Dengan melihat banyaknya pulau yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan latar belakang multikultural yang berbeda-beda.

Multikulturalisme Indonesia –suatu frase yang sangat sering dituturkan dalam buku-buku sejarah, budaya, dan sosial– memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar “kemajemukan budaya”. Konsep masyarakat majemuk (*plural societies*) ini sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Masyarakat majemuk (*plural societies*) yakni masyarakat yang terdiri atas dua elemen atau lebih yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik. Lihat: Furnivall, J.S., 1967. *Netherland India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: The Cambridge University Press, hlm. 446-469.

Keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia menuntut kesabaran dan pengertian yang luar biasa tinggi untuk dapat dipahami sebagai sebuah harmoni. Sebagai gantinya, jika keanekaragaman ini dipandang sebagai sebuah “perbedaan”, maka hasilnya adalah ketidaksepahaman dengan potensi konflik di dalamnya.<sup>2</sup>

Contoh konflik yang muncul karena adanya “perbedaan” dapat dilihat dari beberapa pertikaian antar etnis yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, misalnya konflik antara Etnis Dayak dengan Etnis Madura di Kalimantan Barat pada tahun 1952, 1979, 1983, 1997, dan 1998.

Kemudian konflik antara Etnis Melayu dengan Etnis Madura yang juga terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, serta kerusuhan Etnis Melayu Pontianak dengan Etnis Madura yang terjadi pada 25 Oktober 2000.

Contoh konflik lainnya yakni konflik Ambon pasca reformasi yang menelan korban jiwa 8.000-9.000 orang, kasus kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang menelan korban jiwa 1.217 orang, kasus pengusiran orang-orang Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sejak 2006 sampai 2013 menelan korban jiwa 9 orang, konflik etnis

---

2 Naimah, “65 Tahun Dirgahayu Indonesia: Bayang-bayang Gelap Ancaman Disintegrasi Bangsa” dalam *Jurnal UI untuk Bangsa: Seri Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Desember 2010, hlm. 59.

di Lampung Selatan pada tahun 2012 antara etnis Bali dan etnis pendatang lain yang menyebabkan 14 orang tewas.<sup>3</sup> Itulah contoh nyata terjadinya ketidaksepehaman dengan memaknai keanekaragaman menjadi “perbedaan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan berbagai konflik tersebut maka diperlukan suatu pemahaman pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai melalui paham multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri erat kaitannya dengan nasionalisme karena multikulturalisme merupakan paham yang mendukung nasionalisme.

Jika paham multikulturalisme dapat berjalan baik pada masing-masing individu, maka rasa saling memiliki visi dan misi yang sama dalam tanah air yang sama untuk mewujudkan masyarakat yang berasaskan Pancasila akan mudah terwujud.

Sebaliknya, apabila multikulturalisme gagal dipahami dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai efek. Dampak yang paling sederhana adalah terjadinya penyempitan ke arah paham kebangsaan berbasis suku (etnonasionalisme). Sedangkan kemungkinan terburuknya adalah

---

3 Perkasa, S., “Dari Konflik Ambon hingga Pengusiran Ahmadiyah,” dalam [m.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205693](http://m.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205693), diakses pada 12 Maret 2016.

4 Suharno, “Urgensi Kebijakan Berwatak Multikultural di Indonesia”, disampaikan dalam Konferensi Kewarganegaraan Indonesia Ke-1 di Universitas Negeri Yogyakarta, 19-20 Desember 2015.

disintegrasi bangsa. Konflik di Timor-Timur sebelum merdeka, Aceh, Papua, Sampit, dan konflik lainnya memberikan hikmah penting atas hal itu.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pengikisan paham kebangsaan di Indonesia menjadi persoalan yang fundamental, salah satu gejalanya adalah krisis identitas yang dialami generasi muda. Tidak mengertinya kaum muda terkait simbol-simbol negara menjadi salah satu tanda bahwa krisis identitas kebangsaan itu telah terjadi.

Jika persoalan identitas kebangsaan saja tidak dipahami oleh generasi muda, apalagi substansi dari kebangsaan atau nasionalisme itu sendiri? Pembicaraan tentang nasionalisme menjadi tabu dan terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perlu kiranya dinamika peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi mengkonfirmasi hal-hal tersebut.<sup>6</sup>

Nasionalisme di Indonesia seringkali disalahmengertikan. *Pertama*, nasionalisme yang dianggap hanya merupakan sesuatu yang sudah sangat tua, kuno, dan diwariskan oleh “kejayaan nenek moyang yang begitu agung“

---

5 Suharno, “Membangun Kebangsaan Multikultural dari Bawah”, tulisan hasil kerjasama FISE UNY dengan SKH Kedaulatan Rakyat dalam rangka Dies Natalis ke-44 FISE UNY, 15 September 2009.

6 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan nomenklatur yang digunakan dalam Kurikulum 2013.

(*absolutely splendid ancestors*). Kedua, tentang “bangsa” (*nation*) dan “negara” (*state*), jika dianggap tidak mirip, paling tidak hubungan mereka layaknya suami dan istri yang berbahagia.

Namun, dalam kenyataan sejarah yang terjadi justru berlawanan. Mungkin 85% dari gerakan nasionalis memulai perjuangannya sebagai sebuah gerakan anti-negara (*anti-state*) melawan struktur negara-dinasti yang kolonialistik dan absolutistik.

Paham kebangsaan (nasionalisme) sejak akhir abad 18 hingga paruh pertama abad 20 pernah menjadi ideologi modern paling ampuh<sup>7</sup>. Lintasan sejarah perkembangan dan puncak kejayaan nasionalisme berlangsung selama hampir 200 tahun.

Pada praksis ideologi ini, terdapat masa di mana nasionalisme memberikan kontribusi nyata bagi usaha pemerdekaan dan pembebasan manusia dari penjajahan, meskipun berlangsung pula masa di mana nasionalisme dalam bentuk ideologi sempitnya pernah menjadi legitimasi ideologis bagi terjadinya beberapa tragedi kemanusiaan paling kelam, terutama holocaust dan perang dunia yang tak beradab (*uncivilized*).

---

<sup>7</sup> Paham kebangsaan atau nasionalisme diterjemahkan sebagai identitas kebangsaan, gerakan sosial-politik, dan ideologi. Lihat: Smith, Anthony D., 2003. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Oxford: Balckwell Publishing Ltd., hlm. 6.

Memasuki paruh kedua abad ke-20, ideologi kebangsaan mulai digugat, terutama dalam ruang-ruang diskursif kalangan muda masyarakat akademik. Nasionalisme semakin dianggap tidak relevan dengan dinamika kekinian yang mengglobal, apalagi pasca berakhirnya perang dingin dengan kemenangan Barat.

Intervensi ilmuwan pasca perang dingin seperti Andrew Marshal dan Mathew Horsman (1994), Kenichi Ohmae (1995), serta David Korten (1996), yang dengan tegas mengatakan bahwa nasionalisme tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan global, turut melemahkan peran nasionalisme sebagai ideologi.

Sejarah Indonesia mencatat, ada dua perubahan besar yang sukses dimotori oleh generasi kaum muda, yakni gerakan mahasiswa 1966 dan 1998.<sup>8</sup> Dua angka tahun ini bermaksud untuk menunjukkan pada dua periode kepemimpinan nasional terlama telah berupaya menanamkan nasionalisme dari atas.

Era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, nasionalisme dibangun dengan menciptakan banyak musuh dari luar, antara lain lewat konfrontasi dengan Malaysia, keluar dari PBB, politik anti-Barat, yang juga potret nyata dari kegagalan menciptakan konsensus dan *civic peace*.

---

8 Fajar Kartika, "Gerakan Mahasiswa: Gajah di Pelupuk Mata Tak Nampak", dalam *Info Muria*, Edisi V, Mei-Juli 2011.

Sementara selama masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, politik gambit menjadi ciri khas yang menonjol. Rezim ini mengklaim sebagai pemangku utama nasionalisme yang paling murni dan konsekuen. Metode kekerasan juga digunakan untuk menjaga negara-bangsa, yang sesungguhnya lebih banyak menjadi topeng kepentingan yang sangat sempit.<sup>9</sup>

Kisah kedua rezim tersebut tampak sebagai upaya untuk membangun kebangsaan dari atas dengan pendekatan kepemimpinan, kekuasaan, dan elitisme. Keduanya mewariskan *fragile nationalism* (kebangsaan rapuh) yang terasa hingga saat ini.

Hipotesis tersebut kini harus dibalik. Paham, rasa, dan laku kebangsaan hendaknya dibangun dari elemen kebangsaan itu sendiri, dari *grassroot*, dengan titik berat kaum muda. Nasionalisme Indonesia paling awal sebenarnya dibangun dengan model ini oleh para pemuda melalui Sumpah Pemuda tahun 1928.<sup>10</sup>

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat nasionalisme kaum muda Indonesia sebagai generasi masa depan antara lain: *Pertama*, **optimalisasi ruang-ruang akademik**. Lokus-lokus pembelajaran semestinya menjadi ruang untuk transformasi nasionalisme,

---

9 Suharno, 2010, *loc.cit.*

10 *Ibid.*

juga untuk didiskusikan dan diperdebatkan demi memperkuat sendi-sendinya. Seluruh subjek belajar berpeluang untuk menjadi bagian darinya. Kabar baik jika seluruh akademisi dan praktisi pendidikan memangku *nobles oblige* ini. Bukan saatnya semata mengandalkan akademisi dan praktisi pendidikan kewarganegaraan untuk itu.

*Kedua, penguatan kebangsaan berbasis gerakan mahasiswa.* Dunia aktivisme mahasiswa merupakan peluang besar untuk diskursus, dialektika, dan organisasi isu-isu kebangsaan. Tema-tema aktual kebangsaan harus didekati oleh organisasi kemahasiswaan secara lebih ideologis dan paradigmatik.

*Ketiga, modeling.* Kaum muda tak hanya membutuhkan wacana dan teori untuk penguatan kebangsaan Indonesia. Yang paling mereka butuhkan adalah teladan dari tetua. Untuk mencetak mahasiswa yang berpaham, berasa, dan berlaku kebangsaan dibutuhkan akademisi dan praktisi dengan ajektif serupa. Dengan demikian, nasionalisme tak berhenti pada wacana, akan tetapi menjadi ideologi yang hidup.

*Keempat, membangun komunikasi lintas budaya yang menguatkan kebangsaan.* Dunia mahasiswa hampir tidak pernah homogen. Multikulturalisme melekat di dalamnya. Realitas itu bisa menjadi berkah atau sebaliknya menjadi musibah.

Sangat jamak kita saksikan sisi negatifnya: tawuran antar kelompok mahasiswa, konflik antar asrama mahasiswa, dan sejenisnya. Oleh karena itu, komunikasi lintas budaya di kalangan mahasiswa diorientasikan untuk memperkuat instalasi kebangsaan kita.

“Naik turun” nasionalisme sebenarnya fenomena biasa dan dapat diprediksi serta dipahami polanya. Ada tiga fase pakem ideologi politik, yaitu: kemunculan (*emergence*), kemunduran (*decline*), dan kebangkitan (*resurgence*).

Dengan kaca mata tersebut, kita layak untuk selalu optimis dengan prospek kebangsaan kita, Apalagi jika kaum muda berkomitmen untuk membangun kebangsaan multikultural dari bawah.



# 2

## PENGUATAN KEBANGSAAN BERBASIS GERAKAN MAHASISWA

### A. Gerakan Mahasiswa dan Isu Kebangsaan

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.<sup>1</sup> Mahasiswa merupakan individu yang mencari ilmu dan terdaftar sebagai akademik di lingkungan kampus.

Pada umumnya, mahasiswa telah berusia 18 tahun ke atas, memiliki intelektual yang tinggi, dan cerdas dalam bertindak, serta mampu berpikir kritis.

---

1 Dwi Siswoyo, dkk., 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, hlm.28.

Mahasiswa merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan secara formal. M. Fatwa (2005) menjelaskan bahwa mahasiswa adalah kelompok generasi muda yang mempunyai peran strategis dalam kancah pembangunan bangsa karena mahasiswa merupakan sumber kekuatan moral (*moral force*) bagi bangsa Indonesia.

Mahasiswa adalah generasi muda yang mempunyai peran sangat besar dalam hal membangun bangsa dan negara serta merupakan generasi emas yang menjadi masa depan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas. Oleh karena itu, mahasiswa identik sebagai kaum intelektual yang membawa perubahan. Melalui organisasi, mahasiswa mampu mengapresiasi berbagai inspirasi, mulai dari bakat, pengetahuan, dan teknologi untuk diterapkan di lingkungan masyarakat.

## 1. Aktivis Mahasiswa

Aktivis mahasiswa adalah mereka yang melibatkan diri untuk terjun ke dalam kegiatan organisasi di kampus. Aktivis mahasiswa biasanya terlibat dalam gerakan mahasiswa.

---

2 Syaifullah Syam, "Pola Adaptasi Mahasiswa Baru Jurusan PMPKN FPIPS UPI: Studi Analistik", dalam *Jurnal Civicus*, Volume 1, 2005, hlm. 372-382.

Setiap gerakan mahasiswa tentunya mempunyai tujuan. Gerakan mahasiswa bisa dilakukan di dalam kampus atau di luar kampus, hanya saja tidak perlu semua mahasiswa terlibat. Pada umumnya, para aktivis mahasiswa yang bergerak, tidak semua mahasiswa berkecimpung di ranah aktivis.

Aktivis diartikan sebagai mahasiswa yang giat dalam berkelompok melalui diskusi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maupun organisasi di lingkungan kampus. Adanya gerakan mahasiswa mampu membawa perubahan, baik dalam dunia politik, sosial, maupun budaya. Mahasiswa mempunyai berbagai kegiatan di lingkungan kampus termasuk kegiatan pelaksanaan keilmuan, keahlian, serta pengembangan minat dan bakat.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, aktivis mahasiswa memegang peranan penting sebagai agen perubahan yang turut menentukan situasi perpolitikan nasional. Berakhirnya era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno bermula dari gerakan mahasiswa yang dilancarkan pada tahun 1966 usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G-30S) 1965 dengan melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu aktor utamanya.

Ketika Indonesia mulai memasuki era Orde Baru dengan Soeharto sebagai penguasanya, aksi mahasiswa masih beberapa kali terjadi meskipun berada di dalam rezim yang represif. Contohnya gerakan mahasiswa yang

terjadi pada 15 Januari 1974 atau yang dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari). Saat itu, mahasiswa menggelar aksi terkait kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, ke Jakarta, dan terjadilah insiden kerusuhan di ibukota.<sup>3</sup>

Tahun 1985, aksi mahasiswa terjadi ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, Rudini, berkunjung ke Institut Teknologi Bandung (ITB). Terjadi peristiwa pelemparan terhadap Rudini dalam aksi tersebut.

Aksi mahasiswa pada awal dekade 1990-an terjadi ketika diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus). Sementara gerakan mahasiswa pada 1998 berhasil menjatuhkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dan menandai berakhirnya era Orde Baru.

Kebangsaan merupakan kesadaran berbangsa, yakni mempunyai rasa yang lahir secara alami dengan adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Rasa kebangsaan dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional di mana suatu bangsa

---

3 Harun Gafur, 2015. *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus*. Bandung: Rasibook, hlm. 53,

memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d'être*) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian, rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.

Kepekaan mahasiswa pada saat ini sangat rendah terhadap isu kebangsaan. Padahal, seharusnya mahasiswa bersikap kritis terhadap hal-hal tersebut.

Generasi penerus bangsa pada saat ini juga menghadapi tantangan karena hidup di era globalisasi di tengah kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Ditambah lagi kondisi bangsa yang sedang diterpa krisis nasional, krisis kebangsaan, serta kesenjangan sosial.

## 2. Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah *agent of change* atau agen perubahan. Adapun *Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang berada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya.*<sup>4</sup>

Gerakan mahasiswa Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari zaman pendudukan Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan pada awal abad ke-20 itu diawali dengan adanya kelompok-kelompok studi.

Salah satu kelompok studi mahasiswa ini kemudian melahirkan Boedi Oetomo pada 1908 yang merupakan tonggak awal pergerakan pemuda dengan diprakarsai oleh para mahasiswa dari *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)* atau sekolah kedokteran pribumi di Batavia (Jakarta).

Setelah kelahiran Boedi Oetomo, mulai bermunculan organisasi-organisasi kepemudaan maupun kerakyatan yang mulai berorientasi pada paham kebangsaan, misalnya *Indische Partij (IP)* dan *Sarekat Islam (SI)*, maupun wadah perjuangan pemuda yang berkarakter kedaerahan

---

4 M. Fatwa (Syaifullah Syam), 2005. *Gerakan Mahasiswa*. Diunduh tanggal 3 Juni 2016.

seperti Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, dan lain-lain.

Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru kaum muda Indonesia yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda pada Oktober 1928.

Yang terjadi pada era sekarang adalah, gerakan mahasiswa justru kerap melakukan tindakan-tindakan di luar otoritas sebagai kaum akademis intelektual, seperti aksi pemblokiran jalan, pembakaran ban, bahkan perusakan fasilitas umum. Ini tentunya sangat disayangkan.

Ditambah lagi, mayoritas mahasiswa sepertinya tidak mendalami esensi dan urgensi dari pelaksanaan aksi tersebut. Dalam melaksanakan aksi, biasanya kajian dan diskusi isu tak begitu didalami dan diperhatikan. Padahal, itulah yang justru menjadi dasar dalam melaksanakan aksi.

Generasi muda saat ini tidak begitu tertarik dengan keadaan bangsa maupun isu-isu kebangsaan. Seakan-akan hal tersebut kurang menarik bagi kalangan generasi muda maupun mahasiswa. Mereka yang seharusnya menjadi tumpuan masa depan bangsa justru terlena dengan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran di kalangan generasi muda maupun mahasiswa agar nilai-nilai dan wawasan kebangsaan generasi muda tidak melemah serta berpotensi melunturkan jiwa nasionalisme.

## B. Pemuda dan Gerakan Kultural Bangsa

Dari banyak peristiwa sosial yang terjadi di Indonesia, kita akan mengerti apa maksud peran pemuda yang sesungguhnya dalam pembangunan dan gerakan kultural bangsa. Setiap jengkal peristiwa bersejarah di negara ini semuanya diprakarsai oleh kaum muda.

Dari Sumpah Pemuda di era pergerakan nasional, tindakan kaum muda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamkan, gerakan 1966 yang menurunkan Soekarno dari tahtanya, hingga aksi reformasi 1998 yang mengakhiri era Orde Baru-nya Soeharto, hampir semuanya diprakarsai oleh pemuda dan pemuda yang sadar akan posisi dirinya sebagai penerus kehidupan bangsa.

Kehadiran gerakan pemuda yang sarat nilai dan diapresiasi oleh setiap lapisan masyarakat secara penuh inilah yang kemudian harus selalu dikembangkan. Sehingga pergerakan bangsa menjadi semakin dinamis, dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap dimensi kehidupan selalu berkesinambungan. Pemuda adalah titik nadi kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, tidak salah jika Soekarno pernah mengatakan: "Berilah aku 10 pemuda gagah perkasa, yang jiwanya menyala-nyala dengan semangat persatuan dan kepahlawanan untuk kemerdekaan, maka aku akan dapat menggemparkan dunia!"

Pengakuan terhadap peran kaum muda dalam penentuan nasib bangsa juga dikatakan oleh Mohammad Hatta: “Dari 20 tahun yang lalu, sejarah pergerakan kita menunjukkan bahwa pemuda bersedia berjuang di baris depan, bersedia menjadi pelopor perjuangan bangsa.”

Oleh karena itu, wajar jika negara harus melindungi progresivitas dan kecerdasan emosi serta intelektual generasi mudanya. Semakin progresif generasi muda suatu bangsa, maka kemajuan bangsa akan semakin terlihat di depan mata. Kecerdasan tersebut tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan didukung dan diupayakan secara maksimal oleh bangsanya sendiri.<sup>5</sup>

Kehadiran pemuda akan sangat terasa, terlebih bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya. Memiliki luas wilayah membentang luas dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, terbentang sepanjang 3,977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi.

Bhinneka Tunggal Ika saat ini rasanya tidak cukup untuk bisa mempersatukan warga negaranya dalam satu

---

5 Yuddy Chrisnandi, “Gerakan Mahasiswa (Mengembalikan Ruh Perjuangan Reformasi)”, dalam makalah yang disampaikan pada acara Rembug Mahasiswa & Pemuda se-Indonesia di Bandung, 12 Februari 2001, hlm. 21.

rasa kesatuan sebagai bangsa. Pada kenyataannya, masih ada gerakan-gerakan beraroma separatistis yang mengatasnamakan agama dan suku, misalnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), juga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Secara prinsip, mereka sebenarnya mengaku saudara dengan kita dalam satu naungan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun janji pemerintah untuk mensejahterakan mereka yang tak kunjung ditepati tak ayal membuat mereka frustrasi dengan kemiskinan dan akhirnya membuat mereka menuntut kemerdekaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan kultural yang dapat mempersatukan semuanya dengan usaha yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan rasa toleransi dan menebar paham pluralisme dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam sebenarnya telah dicontohkan tentang semangat pluralisme misalnya dengan adanya penghormatan terhadap perbedaan pemikiran madzab yang berlaku dalam hukum Islam bahkan sampai sekarang.

Alangkah indahnyanya tatanan keharmonisan itu, namun tak lain dan tak bukan juga karena hasil dari usaha pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Menyikapi perbedaan dengan arif dan menghargainya namun tidak membedakan serta meninggikan yang satu di atas yang lainnya adalah solusi.

Sementara itu, bersamaan dengan peran pemerintah, kaum generasi muda harus bergerak atas nama kedaulatan bangsa dengan jalan yang sama (kultural) sebagaimana dilakukan pendahulu kita di masa-masa sulit dalam cengkeraman penjajah. Masa-masa saat Indonesia sulit mengembangkan kedaulatannya secara utuh. Saat orang-orang tua yang berjuang dengan senjata mulai putus asa, peran kaum muda sangat diperlakukan untuk hal ini dan itu terwujud saat kaum muda kala itu mulai sadar akan kebutuhan bangsanya.

Mereka mulai mendirikan berbagai perkumpulan kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, sampai pada lingkup lebih kecil seperti Jong Bagelen. Mereka mulai bersatu sekuat tenaga bukan hanya dengan senjata, akan tetapi dengan daya intelektual, terutama bagi mereka yang merasakan bangku pendidikan, bahkan yang bersekolah di lembaga bikinan kaum kolonial.

Pergerakan kultural dari kaum muda Indonesia juga terlahir melalui organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam sejarahnya, gerakan tersebut menandai salah satu arti penting kehadiran kaum muda dalam kancan kehidupan berbangsa.

Lahir pula banyak organisasi pengkaderan yang siap mendidik dan mengkader generasi muda dengan

berbasis intelektual (HMI, PMII, IMM, dan lain-lain). Semuanya juga lahir dengan itikad yang sama yakni membangun bangsa.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, pemerintah adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dan segera mencari solusi yang tepat demi kesinambungan pergerakan dan kesejahteraan rakyat. *Pertama*, pemerintah harus lebih peka dalam mengawal sistem perlindungan anak. Dengan sistem perlindungan anak yang baik dan mengawalinya secara ketat, akan membentuk pribadi anak menjadi pemuda bermental tangguh dan mampu menghadapi setiap tantangan. Mereka yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Dengan mengawasi lebih ketat para aparat penegak hukumnya, kesalahan langkah kebijakan hukum yang diambil akan berpengaruh besar pada keseimbangan

---

6 Salim HS, Hairus, & M. Ridwan, 1999. *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural*. Yogyakarta: LKIS, hlm. 29.

mental mereka dan menjadikannya anti sosial dapat dihindari. Anti sosial dini akan mempengaruhi masa-masa selanjutnya.

Pemerintah juga harus sadar untuk tidak menjadikan generasi muda sebagai alat untuk meraih kekuasaan, sehingga mereka tidak terpengaruh untuk melakukan hal yang sama dan lagi-lagi menodai kemuliaan gerakan mereka yang sesungguhnya di kemudian hari. Selain persoalan pengawasan sistem, persoalan yang tak kalah jauh pentingnya adalah menjaga kebhinekaan Indonesia.<sup>7</sup>

*Kedua*, masyarakat dan orang tua yang selalu mengapresiasi sekaligus mengawasi setiap pola gerakan yang dilakukan. Masyarakat terutama orang tua selaku komponen terdekat yang bisa memberikan arahan langsung secara pribadi kepada generasi muda untuk menyadari betul pentingnya arti idealisme dalam setiap gerakan mereka dan menumbuhkan kepekaan sosial.

Dukungan materil dan immateril juga harus dialirkan kepada setiap gerakan mahasiswa atau kaum muda, karena tanpa dukungan penuh masyarakat dan orang tua tidak akan ada gerakan revolusi atas nama kemanusiaan.<sup>8</sup>

---

7 Yuddy Chrisnandi, 2001, *op.cit.*, hlm. 26.

8 Launa, "Gerakan Intelektual dan Aksi Massa Mahasiswa: Refleksi dan Prospeksi Peran Politik Mahasiswa Era Orde Baru", dalam *Jurnal Widya*, Nomor 183, Tahun 2000, hlm. 40.

Gerakan mahasiswa dan kaum muda berhasil menorehkan sejarah berkat dukungan dari masyarakat dan keluarga. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa mahasiswa yang hilang diculik dalam peristiwa tumbangnya Orde Baru pada 1998, sementara para orang tua mereka tak menyesal dan bahkan membanggakan diri anaknya yang berjuang atas nama negara dan rakyat.

*Ketiga*, generasi muda harus sadar dengan sendirinya bahwa mereka adalah tulang punggung bangsa. Kreativitas dan progresivitas mereka akan mempengaruhi denyut kehidupan bangsa. Seperti halnya menanggulangi banjir di Jakarta, pemerintah selalu menjadi kambing hitam atas banjir yang kerap terjadi. Padahal, pemerintah bukan Tuhan yang mampu mengatasi keadaan semudah membalik telapak tangan.

Yang ditekankan di sini adalah bahwa sebaik apapun sistem yang dirumuskan pemerintah, selama masyarakat membuang sampah sembarangan maka banjir akan selalu datang.

Begitupun dengan generasi pemuda. Selama generasi muda itu sendiri tidak sadar dengan apa yang seharusnya dilakukan maka sebaik apapun sistem yang dilakukan pemerintah untuk melindunginya sejak dini, pengawasan serta dukungan masyarakat dan orang tua tidak akan ada artinya.

Hal ini diperkuat dengan pendapat A. Bakir Ihsan dan M. Bahruddin Dahlan yang menyatakan bahwa gerakan kultural tidak bisa berhasil seratus persen bila kita mengabaikan tiga komponen yang saling terkait, yaitu idealisme sebagai cerminan dari gairah pemuda, intelektualitas sebagai representasi dari *trademark* mahasiswa, dan religiusitas sebagai bagian dari nilai keagamaan. Patokan dasar ini harus dicermati lebih mendalam organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sebagai dasar untuk menyukseskan gerakan kultural.

Gerakan kultural dan kebangkitan toleransi serta pluralisme budaya yang dibangun pemuda berikut pemerintah adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan semua kembali stabil seperti sediakala, karena hanya gerakan kultural yang mampu mendamaikan berbagai hal.

Dengan ini, maka pemerintah (juga masyarakat dan pemuda), tidak punya pilihan lain kecuali menggalakkan kembali gerakan kultural, meneguhkan visi kebangsaan dalam setiap gerakan dan bergerak demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara.

Memang, harus diakui membangun gerakan kultural tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, dengan kesadaran yang tinggi bergerak atas nama kesejahteraan rakyat dan kemajuan kehidupan berbangsa, kesulitan ini agaknya dapat diatasi dengan

pelan tapi pasti. Dengan atau tanpa kekuatan politik dan kekuasaan, gerakan kultural dapat dilakukan seoptimal mungkin.<sup>9</sup>

Kunci pamungkas ada di tangan generasi muda, terutama mahasiswa. Jika mereka mau melakukannya dengan sepenuh hati, tulus, dan rela berkorban, masyarakat pun akan membantu dengan segala daya dan upaya. Dengan begitu, pemerintah tidak akan punya pilihan lain selain mendukung apa yang dilakukan kaum muda dan disokong sepenuhnya oleh rakyat. Jika hal tersebut terjadi, maka mimpi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera akan tercapai suatu hari nanti.

Jadilah pengabdian rakyat yang baik, pengabdian dengan kesadaran serta tanggung jawab penuh untuk kemajuan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat dan bangsa. Setidaknya, dengan menjadi pengabdian rakyat yang sejati, generasi muda kelak akan tetap berusaha dengan sekuat tenaga, bukan hanya untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik dalam segala bidang, namun juga berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan keunikan ragam khas budayanya.

Dengan keberhasilan gerakan kultural, maka tak ada lagi perang antar agama dan ras, tak akan terdengar

---

9 Grendi Hendrastomo, "Nasionalisme vs Globalisasi: Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern, dalam Jurnal *Dimensia*, Volume I, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 31.

kembali teriakkan tuntutan merdeka karena keadilan dan kesejahteraan yang sama rata, dan mampu bergandengan tangan karena kita semua bersaudara.<sup>10</sup>

Rakyat berhak untuk memperoleh kehidupan, pekerjaan, kesehatan serta pendidikan yang layak, merata tanpa memandang apakah ia miskin atau kaya. Jika benar terjadi, semua orang bahagia menjadi warga Indonesia, negara serba majemuk dengan keberhasilan gerakan kulturalnya, dan lagi-lagi semua ditorehkan dengan tinta emas keringat, pikiran, serta tiap tetes darah perjuangan generasi mudanya. Pemuda-pemuda yang idealis, tanpa pamrih, sadar dan bertanggung jawab atas negara dan rakyatnya.<sup>11</sup>

### C. Gerakan Pemberdayaan dan Identitas Bangsa

Diskusikan tentang mahasiswa dan gerakannya sudah lama menjadi pokok bahasan dalam berbagai kesempatan. Begitu banyaknya forum-forum diskusi yang diadakan, telah menghasilkan pula pelbagai tulisan, makalah, maupun buku-buku yang diterbitkan tentang hakikat, peranan, dan kepentingan gerakan mahasiswa dalam pergulatan politik kontemporer di Indonesia. Teru-

---

10 Reva Sonia Izati, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa, dalam *Jurnal PPKn UNJ Online*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 14.

11 Yuddy Chrisnandi, 2001, *op.cit.*, hlm. 98.

tama dalam konteks kepeduliannya dalam meresponi masalah-masalah sosial-politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam.

Kehadiran gerakan mahasiswa sebagai perpanjangan aspirasi rakyat dalam situasi yang demikian itu memang amat dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat dan advokasi atas konflik-konflik yang terjadi *vis a vis* penguasa.

Menurut pendapat secara umum, advokasi yang dilakukan lebih ditujukan pada upaya penguatan posisi tawar rakyat maupun tuntutan-tuntutan atas konflik yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas kepeduliannya yang mendalam terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, segala ragam bentuk perlawanan

---

12 Launa, 2000, *op.cit.*, hlm. 61.

yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya.

Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Saking begitu berartinya, sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (*social change*) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa.

Alasan utama menempatkan mahasiswa beserta gerakannya secara khusus dalam tulisan singkat ini lantaran kepeloporannya sebagai “pembela rakyat” serta kepeduliannya yang tinggi terhadap masalah bangsa dan negaranya yang dilakukan dengan jujur dan tegas. Walaupun memang tak bisa dipungkiri, faktor keberpihakan terhadap ideologi tertentu turut pula mewarnai aktivitas politik mahasiswa yang telah memberikan kontribusinya yang tak kalah besar dari kekuatan politik lainnya.

Oleh karenanya, penulis menyadari bahwa deskripsi singkat dalam artikel ini belum seutuhnya menggambarkan korelasi positif antara pemihakan terhadap ideologi

tertentu dengan kepeloporan yang dimiliki dalam menengahi konflik yang ada.

Mungkin bisa dikatakan artikel ini lebih banyak mengacu pada refleksi diskursus-diskursus politik kekuasaan otoritarian Orde Baru yang sengit dilakukan di kalangan aktivis mahasiswa pada dekade 1990-an di mana sebagian besar gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi kala itu penulis ikut terlibat di dalamnya. Tentunya, pendekatan analisis dalam artikel ini lebih mengacu pada gerakan mahasiswa pro-demokrasi jauh sebelum maraknya gerakan mahasiswa dalam satu tahun terakhir ini, yang akhirnya mengantarkan pada pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan.

Keberpihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan mahasiswa memang tak bisa dihindari. Pasalnya, pada diri mahasiswa terdapat sifat-sifat intelektualitas dalam berpikir dan bertanya segala sesuatunya secara kritis dan merdeka serta berani menyatakan kebenaran apa adanya.

Maka, diskursus-diskursus kritis seputar konstelasi politik yang tengah terjadi kerap dilakukan sebagai sajian wajib yang mesti disuguhkan serta dianggap sebagai tradisi yang melekat pada kehidupan gerakan mahasiswa.

Pada mahasiswa, ada berbagai potensi yang bisa dikualifikasikan sebagai *modernizing agents*. Praduga bahwa dalam kalangan mahasiswa kita semata-mata menemukan

transformasi sosial berupa label-label penuh amarah, sebenarnya harus diimbangi pula oleh kenyataan bahwa dalam gerakan mahasiswa inilah terdapat pahlawan-pahlawan damai yang dalam kegiatan pengabdianya terutama (kalau tidak melulu) didorong oleh aspirasi-aspirasi murni dan semangat yang ikhlas.

Kelompok ini bukan saja haus edukasi, akan tetapi berhasrat sekali untuk meneruskan dan menerapkan segera hasil edukasinya itu, sehingga pada gilirannya mereka itu sendiri berfungsi sebagai edukator-edukator dengan cara-caranya yang khas.

Masa selama studi di kampus merupakan sarana penempatan diri yang telah mengubah pikiran, sikap, dan persepsi mereka dalam merumuskan kembali masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Berhentinya suatu ideologi dalam memecahkan masalah yang terjadi merangsang mahasiswa untuk mencari alternatif ideologi lain yang secara empiris dianggap berhasil.

Maka tak jarang, kajian-kajian kritis yang kerap dilakukan lewat pengujian terhadap pendekatan ideologi atau metodologis tertentu yang diminati. Ketika mereka menemukan kebijakan publik yang dilansir penguasa tidak sepenuhnya akomodatif dengan keinginan rakyat, bagi mahasiswa yang berkomitmen dengan mata hatinya, mereka akan merasa terpanggil sehingga terangsang untuk bergerak.

Dalam kehidupan gerakan mahasiswa, terdapat adagium patriotik yang bakal membius semangat juang lebih radikal. Semisal, ungkapan “menentang ketidakadilan dan mengoreksi kepemimpinan yang terbukti korup dan gagal” lebih mengena dalam menggugah semangat juang agar lebih militan dan radikal. Mereka sedikit pun takkan ragu dalam melaksanakan perjuangan melawan kekuatan tersebut.

Berbagai “senjata” yang ada di tangan mahasiswa bisa digunakan untuk mendukung dalam melawan kekuasaan agar perjuangan maupun pandangan-pandangan mereka dapat diterima. “Senjata-senjata” itu antara lain seperti: petisi, unjuk rasa, boikot, pemogokan, hingga mogok makan.

Dalam konteks perjuangan memakai “senjata-senjata” yang demikian itu, perjuangan gerakan mahasiswa jika dibandingkan dengan intelektual profesional lebih punya keahlian dan efektif.<sup>13</sup>

Kedekatannya dengan rakyat terutama diperoleh lewat dukungan terhadap tuntutan maupun selebaran-selebaran yang disebarluaskan dianggap murni pro-rakyat tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain.

Adanya kedekatan dengan rakyat dan juga kekuatan masif mereka menyebabkan gerakan mahasiswa bisa

---

13 Harun Gafur, 2015, *op.cit.*, hlm. 57.

bergerak cepat berkat adanya jaringan komunikasi antar mereka yang aktif (teori *snow bowling*).<sup>14</sup> Oleh karena itu, sejarah telah mencatat peranan yang teramat besar yang dilakukan gerakan mahasiswa selaku *prime mover* terjadinya perubahan politik pada suatu negara.

Secara empirik, kekuatan mereka terbukti dalam serangkaian peristiwa penggulingan kekuasaan, antara lain: Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958, Soekarno di Indonesia tahun 1966, Ayub Khan di Pakistan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipina tahun 1985, dan Soeharto di Indonesia tahun 1998.

Akan tetapi, sebagian besar peristiwa penggulingan kekuasaan itu bukan menjadi monopoli gerakan mahasiswa sampai akhirnya tercipta gerakan revolusioner. Namun, gerakan mahasiswa lewat aksi-aksi mereka yang bersifat masif-politis telah terbukti menjadi katalisator yang sangat penting bagi penciptaan gerakan rakyat dalam menentang kekuasaan tirani.<sup>15</sup>

---

14 Joesoef, D. *Normalisasi Kehidupan Kampus dan Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978, hlm 91.

15 *Ibid.* hlm 120.

## D. Gerakan Mahasiswa dan Era Reformasi

Adalah tanggungjawab sejarah generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk terus berjuang memperbaiki nasib bangsanya. Sebagian besar rakyat kita adalah masyarakat yang belum bebas dari kebodohan dan kemiskinan, di pundak mahasiswa-lah mereka menaruh harapan akan masa depan anak-anaknya agar hidup lebih baik di masa mendatang.

Melalui kemampuan intelektualitas, seharusnya mahasiswa mampu menangkap perasaan rakyat akan pentingnya kesejahteraan dan demokrasi, yang adil dan merata, sebagai konsekuensi logis dari negara yang merdeka-berdaulat.

Kemerdekaan berarti kebebasan untuk menentukan nasib dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkehidupan. Artinya, kemerdekaan harus mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat untuk hidup layak, serta turut andil dalam proses bernegara.

Itulah demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam urusan negara, sesuai dengan sistem negara yang disepakatinya. Dalam hal ini, rakyat berhak mempertanyakan nasibnya dan menyuarakan pendapatnya. Secara kolektif, perikehidupan rakyat yang baik akan tercipta bila negara dikelola oleh aparat yang bersih, jujur, dan transparan dalam melaksanakan tugasnya.

Konsekuensinya, negara harus bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang mengorbankan kepentingan rakyat. Maka hanya dengan pemerintahan yang bersih dan kejujuran, para pengelola negara memiliki kewibawaan.

Untuk menjamin negara yang sehat, tidak lain hukum harus ditegakkan. Supremasi hukum merupakan fondasi yang mengikat obyektivitas penyelenggaraan negara di mana pengelola negara hanya mengabdikan pada kebenaran dan kepentingan umum. Hanya dengan menegakkan hukum dan moralitas kejujuran, demokrasi yang sebenarnya akan terbangun dengan kokoh.

## **E. Gerakan Reformasi**

Reformasi atau pembaharuan (perubahan yang signifikan atas hal yang dianggap menyimpang), telah berlangsung di berbagai belahan dunia sejak zaman *renaissance* pada abad ke-15 Masehi.

Berawal di Jerman dengan pemikiran Martin Luther King, yang menggugat penyimpangan ajaran Kristiani, berlanjut pada pemikiran Thomas Hobbes tentang *State of Nature*-nya di Inggris, kemudian John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan lain-lain, hingga pemikiran demokrasi modern-nya Robert A. Dahl, berintikan pentingnya moralitas pemimpin untuk menjalankan demokrasi.

Demokrasi tidak saja berarti kekuasaan di tangan rakyat, namun juga desakralisasi pemimpin yang dibatasi aturan konstitusi dan diawasi oleh lembaga lain di mana rakyat memiliki hak atas mandat pemimpinnya.<sup>16</sup>

Gerakan reformasi acapkali terjadi manakala seorang pemimpin berlaku korup dan manipulatif, sehingga diperlukan langkah-langkah politik yang berarti dari rakyat untuk melakukan perbaikan, atau apabila rakyat merasakan adanya kekurangan dalam sistem konstitusi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan kedua alasan itulah, apa yang terjadi di Korea Selatan dengan “Uprising in Gwangju” tahun 1986, di Cina dengan Tragedi Tiananmen tahun 1989, dan di Indonesia dengan lengsernya Soeharto tahun 1998, merupakan gerakan reformasi yang berdampak pada penyelenggaraan negara.

Secara faktual, mahasiswa menjadi ujung tombak sekaligus mainstream dari gerakan perubahan yang berlangsung di manapun. Dengan nalar intelektualitasnya, mahasiswa mampu menemukan argumentasi rasional mengenai kondisi yang bobrok dan tidak sesuai dengan semangat konstitusi atau nilai kemanusiaan.

Hanya mahasiswa yang mampu menjadi pionir perubahan, sekaligus menjadi kekuatan yang paling ditakuti

---

16 Yuddy Chrisnandi, 2001, *op.cit.*, hlm. 43.

oleh rezim penguasa despotik yang korup di belahan dunia manapun.

Tidak mengherankan, bagi Indonesia, gerakan mahasiswa menuntut perubahan, berlangsung pasang surut sejak tahun 1966. Pemerintahan Soekarno yang mengabaikan demokrasi, tumbang oleh gerakan mahasiswa pada 1966.

Soeharto yang baru berkuasa selama 4 tahun harus menghadapi gelombang protes gerakan mahasiswa tahun 1974. Sejak saat itu, Soeharto membatasi mahasiswa yang telah memberikan kedudukan padanya.

Gerakan mahasiswa bangkit kembali pada 1977-1978 hingga mencapai puncaknya Mei 1998. Tuntutan reformasi nasional yang dikumandangkan mahasiswa, memicu kesadaran masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa. Pada saat itu, hanya kaum mahasiswa yang berani bersuara di bawah ancaman laras senjata dan berani melangkah kaki di bawah desingan peluru dan gas air mata.

Lebih dari 30 tahun di bawah rezim Soeharto, tidak ada perubahan yang berarti dalam berdemokrasi. Rezim Soeharto memanipulasi demokrasi dan membangun imperium kekuasaan ekonomi yang korup. Maka lahirlah tuntutan demokratisasi dan berantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Dua tema inilah yang kemudian menelurkan turunan 6 Visi Reformasi yang berintikan penegakan hukum, demokratisasi dan pemberantasan KKN, yang di dalamnya terdapat tuntutan untuk mencabut Dwifungsi ABRI, pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya, revisi UU politik, perbaikan ekonomi, hingga Sidang Istimewa MPR.

Gerakan reformasi mahasiswa tidak mempersoalkan siapa yang akan menggantikan Soeharto, namun lebih kepada proses yang demokratis dengan platform reformasi tersebut. Maka Habibie pun dipersoalkan, bahkan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, dengan segala kekurangannya dibiarkan memimpin bangsa.

Maka dapat disimpulkan, bahwa gerakan reformasi mahasiswa adalah gerakan yang independen, non-partisan, lebih didasarkan pada substansi perubahan daripada pelaksana perubahan. Mengingat hal tersebut, tidak ada alasan bagi gerakan mahasiswa untuk menimbang-nimbang siapa yang menjadi pelaksana reformasi, namun yang lebih penting mempertanyakan apa yang dilakukannya terhadap reformasi.<sup>17</sup>

## **F. Gerakan Moral Kebangsaan**

Adalah sebuah keharusan sejarah bagi mahasiswa sebagai benteng moral kehidupan bangsa untuk menggugat praktek kekuasaan yang tidak mencerminkan Reformasi.

---

17 *Ibid.*, hlm. 34.

Naiknya Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) secara demokratis, memiliki konsekuensi logis melaksanakan agenda reformasi yang dicanangkan mahasiswa bersama rakyat, sebagai tanggungjawab moral dan tersirat secara konstitusional.

Dua hal penting yang dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap reformasi yaitu pengingkaran supremasi hukum dan terlibat KKN. Apapun alasannya, kedua hal tersebut tidak dapat diterima oleh mahasiswa dan seluruh gerakan reformasi yang memiliki saham terbesar dalam kehidupan demokrasi sekarang ini.

Maka, rasionalitas mahasiswa yang telah memasuki tahap konsolidasi demokrasi, memiliki argumentasi yang kuat yang tidak dapat dipatahkan untuk meluruskan kembali cita-cita reformasi.<sup>18</sup>

Sebagai sebuah komunitas besar mahasiswa, logika argumentatif menuntut Presiden Gus Dur untuk mundur merupakan sesuatu yang seharusnya. Lepas dari ada tidaknya fakta hukum dalam kasus Bulog dan Brunei-Gate, keterlibatan presiden dalam persoalan tersebut merupakan bentuk pengingkaran semangat reformasi yang ingin bebas dari KKN.

Selain melanggar konstitusi dan Tap MPR, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek KKN,

---

18 Grendi Hendrastomo, 2007, *op.cit.*, hlm. 27.

sudah pada tempatnya diberlakukan pertanggungjawaban moral dari yang bersangkutan. Belum lagi bila kita mengurai satu per satu praktek dan perilaku penyelenggaraan kekuasaan yang tidak pantas dilakukan dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan modern.

Maka dari itu, gerakan moral merupakan kekuatan independen yang tidak terkait dengan kepentingan dan agenda politik orang-perorang. Gerakan mahasiswa adalah pelurus sejarah kebenaran, yang tidak pernah berubah setiap masa, walaupun pelakunya silih-berganti. Sebagai gerakan moral, tidak pada tempatnya menanggapi berbagai isu sinis yang ditujukan untuk membelah kekuatan dan menyurutkan semangat idealisme.

Gerakan moral tidak berkepentingan dengan siapa yang akan dimundurkan dan siapa yang akan menggantikan, sejauh dapat diterima dengan rasionalitas konstitusional. Sehingga, tuduhan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi atau dibiayai merupakan fitnah dan kepanikan dari para penuding yang sudah kehilangan akal untuk menghentikan gerakan reformasi mahasiswa.

### **G. Keyakinan & Idealisme**

Pertikaian antar elite politik yang saling berebut, dalam kontek independensi dan substansi gerakan reformasi, samasekali tidak ada hubungannya. Sekalipun dalam implementasinya, keberhasilan gerakan reformasi

mahasiswa memerlukan dukungan taktis dari kekuatan lain yang signifikan. Namun demikian, bukan berarti mahasiswa tidak dapat menentukan platform dan keberanian melakukan tindakan tanpa kekuatan lain.

Gerakan moral yang sudah melampaui proses rasionalisasi dan tersosialisasi dalam waktu yang relatif cepat akan menjalar sampai ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, ke berbagai tempat ibadah, ke barak-barak tentara, tersiar dari pantai hingga ke pegunungan dan masuk ke dalam sanubari seluruh rakyat yang masih mendambakan kebenaran untuk turut mendukung apa yang tengah dilakukan oleh mahasiswa. Itulah idealisme.

Idealisme mahasiswa tidak akan pernah dapat dihalangi oleh rintangan dan ancaman apapun. Idealisme memiliki mata hati dan nuraninya sendiri yang mandiri. Keyakinan akan apa yang diperjuangkan, mendorong gerakan reformasi mahasiswa bertambah kuat dan meluas yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun sebelum sampai ke tujuannya.

Maka, sekalipun Amien Rais, Akbar Tanjung, Megawati Soekarnoputri, atau yang lainnya berpendapat sama dengan pendapat mahasiswa, namun mereka sama sekali tidak dapat mengatur gerakan moral yang berlangsung. Terlebih ancaman, teror, isu, intrik dan tuduhan yang dilakukan oleh para pendukung kekuasaan, sama sekali

tidak menyurutkan keyakinan mahasiswa untuk terus menegakkan kebenaran dan menjalankan agenda reformasi.<sup>19</sup>

Sebagai gerakan moral yang rasional, gerakan mahasiswa yang intelektual perlu ditunjukkan dengan sikap yang demokratis dan anti anarkis. Kita tunjukkan bahwa proses pembodohan tidak berlaku bagi mahasiswa, yang membungkus tindakan anarki dengan retorika demokrasi. Mahasiswa harus mengutuk tindakan premanisme politik kekerasan, yang menghalalkan anarkisme untuk tujuan politik dengan memanipulasi kebodohan rakyat.

Untuk itu jelas, hanya satu kata perjuangan yaitu bersatu, rapatkan barisan, bahu-membahu, dan tegakkan kebenaran di jalan yang benar. Akhirnya, idealisme perjuangan mahasiswa harus mampu mengembalikan ruh perjuangan reformasi di mana kita telah merebutnya. Jangan biarkan reformasi mati suri di tangan para diktator yang berkedok demokratis.

## **H. Gerakan Mahasiswa dalam Konstruksi Indonesia Baru**

Setiap negara memiliki harapan besar kepada warga negaranya, khususnya kaum generasi muda. Dalam rangka meningkatkan stabilitas nasional dan konstruksi negara itu, salah satu bagian dari pemuda adalah mahasiswa

---

19 Syaifullah Syam, 2005, *op.cit.* hlm. 14.

sebagai kaum intelek dan rasional memikul tanggung jawab yang tinggi terhadap negaranya. Mereka bagian yang netral dalam berpolitik sehingga mereka dapat dengan lebih leluasa menyuarakan aspirasi rakyat kecil.

Mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki peran yang sangat signifikan dalam kontruksi Indonesia baru.<sup>20</sup> Semangat yang membara serta kerja kerasnya sangat membantu rakyat kecil dalam menyuarakan keadilan dan kesejahteraan pada pemerintah. Tidak lagi memihak pada siapapun, yang ada hanya memperjuangkan nasib rakyat kecil.

Pergantian struktur kekuasaan di Indonesia selalu diwarnai oleh peran mahasiswa dengan basis pengorganisasian dan perlawanan. Bermula dari kampus ke kampus, kaum mahasiswa pada akhirnya mampu membangun harmoni dengan rakyat dan menjadikan kampus sebagai benteng kebenaran rakyat yang terakhir.<sup>21</sup>

Selain *agent of change*, mahasiswa juga merupakan struktur yang unik dalam tatanan masyarakat, baik dilihat dari sudut politik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini dikarenakan masa ketika menjadi mahasiswa adalah transisi sebelum mereka melanjutkan dirinya sebagai profesional, pemikir, pejuang, politisi, atau pengusaha.

---

20 Launa, 2000, *op.cit.* hlm. 28.

21 Joesoef, D., 1978, *op.cit.*, hlm. 95.

Selain itu, keunikannya juga tampak dari kebebasan yang mereka miliki, baik kebebasan berpikir, berpendapat berekspresi, atau melakukan apapun.

Komunitas mahasiswa juga merupakan satu-satunya komunitas yang paling dinamis dalam menangkap dan mengakomodasi sebuah perubahan serta paling harmonis dalam menyuarakan pendapat. Sebab, mahasiswa adalah asosiasi dari kejujuran, integritas dan semangat moral. Dalam diri mahasiswa, juga terdapat kumpulan calon cendekiawan, pahlawan, negarawan, serta profesi lainnya.

Gerakan mahasiswa pada dasarnya merupakan gerakan moral, yang tidak punya kepentingan politik ataupun kekuatan yang masif untuk masuk dan merebut tatanan politik yang praksis, sebagai sebuah gerakan moral, kekuatan mahasiswa hanya mampu menjadi pendobrak tanpa mampu memberikan legitimasi kontrol yang kuat dari sebuah proses politik, bahwa kemudian gerakan mahasiswa itu mampu memberi warna itulah yang kemudian tercatat dalam sejarah.

Gerakan perlawanan mahasiswa Indonesia sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Tan Malaka, Tjipto Mangoenkoesoemo, Agoes Salim, dan lainnya adalah sedikit dari sekian banyak kaum terpelajar Indonesia

(mahasiswa) yang pada akhirnya menjadi *founding father* dari lahirnya negara ini. Maka dari itu, jasa-jasa mereka semestinya patut dikenang sampai akhir hayatnya, bahkan sampai saat ini.

Terlepas dari itu, yang perlu ditegaskan adalah bagaimana gerakan mahasiswa bersatu-padu dalam membangun Indonesia baru serta bagaimana perjalanan panjang menumbangkan rezim Orde Lama dan Orde Baru. Tanpa peran generasi muda dan mahasiswa saat itu, belum tentu kita dapat merasakan kemerdekaan ini serta terlepas dari genggaman Orde Lama dan Orde Baru.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soekarno sampai tahun 1966 atau yang disebut dengan Orde Lama. Dalam kepemimpinan Soekarno, ada kebijakan yang menimbulkan kontroversi, seperti pernyataannya sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, tingginya harga sembako turut mewarnai kepemimpinannya.

Hal tersebut mengundang reaksi rakyat, dan mereka berdemonstrasi agar dipenuhi segala tuntutan yang kemudian dikenal dengan istilah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Tidak hanya itu, kediktatoran Soekarno juga membuat rakyat semakin tertindas.

Akhirnya, pada tahun 1966, kekuatan gerakan mahasiswa muncul sebagai bagian dari perubahan politik

nasional. Mahasiswa bersama dengan Angkatan Darat yang dimotori oleh Soeharto berhasil menumbangkan rezim Orde Lama. Mereka kemudian membangun sebuah hegemoni rezim pengganti bernama Orde baru.

Sejarah kemudian mencatat bahwa para mahasiswa yang masuk ke dalam politik praksis tersebut turut serta melanggengkan keamanan rezim dan melakukan banyak kesewenangan untuk kekuasaan mereka. Banyak dari generasi 1966 yang menjadi pengambil keputusan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Pada era reformasi, gerakan pemuda terus berkembang dan mengalami kemajuan. Gerakan itu terealisasi dalam bentuk yang bervariasi, seperti keagamaan, kebudayaan, kesenian, kedaerahan dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut di bentuk untuk membangun Indonesia baru dan dalam gerakan tersebut yang menjadi cikal-bakalnya adalah kaum muda. Maka, wajar jika mereka sangat diharapkan di setiap negara dan gerakan-gerakan yang muncul dimotori oleh pemuda.

Lahirnya gerakan sosial ditandai dengan beberapa hal. *Pertama*, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu, misalnya pemerintahan moderat lebih memberikan kesempatan timbulnya gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada, misalnya perubahan dari

masyarakat tradisional ke masyarakat modern. *Kedua*, gerakan sosial adalah semata-mata masalah kemampuan dari tokoh penggerak.

Kedua tanda sosial di atas, jika disatukan dapat menjelaskan lahirnya gerakan mahasiswa. Adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas, meningkatnya krisis ekonomi dan politik menyebabkan lahirnya gerakan mahasiswa 1998. Mahasiswa bersama rakyat bersatu menumbangkan rezim Orde Baru dan menuntut adanya pemerintahan yang lebih demokratis demi memenuhi aspirasi rakyat sehingga terjadilah reformasi.



# 3

## **MEMBANGUN KEBANG- SAAAN MULTIKULTURAL DARI BAWAH MELALUI PEMODELAN**

**P**enguatan kebangsaan terhadap warga negara terutama pada generasi muda sangat perlu dilakukan sejak dini. Era yang sedang berkembang saat ini adalah era keterbukaan, di mana semua informasi bisa diakses dengan cepat.

Jika generasi muda tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air, maka dikhawatirkan akan dapat menggerogoti jiwa kebangsaannya dan dapat menghilangkan nasionalisme pada dirinya.

Sebagai contoh, adanya sikap rasisme di dalam diri yang akan menyebabkan terjadinya konflik yang didasari oleh perbedaan. Untuk meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan oleh memudarnya rasa persatuan dan kesatuan ini, maka diperlukan solusi terhadap masalah tersebut.

Solusi yang ditawarkan dapat berupa penguatan kebangsaan melalui pendidikan. Pendidikan yang diberikan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau generasi muda bagaimana suatu konflik yang muncul dapat dicarikan solusinya.

Pada proses pendidikan, mahasiswa tidak hanya membutuhkan teori semata, melainkan dengan model atau sikap keteladanan yang bisa dijadikan contoh atau yang dapat ditiru oleh mahasiswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Guru atau dosen dapat memberikan contoh keteladanan dalam diskusi pemecahan konflik di dalam kelas.

Adapun pada proses untuk membangun rasa kebangsaan multikultural ini tidak hanya dilakukan oleh guru atau dosen semata, tetapi juga bisa dilakukan oleh para praktisi sebagai contoh keteladanan para pejabat publik. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

## A. Akademisi

Dalam bidang akademisi, yang lebih disorot adalah guru dan dosen sebagai figur pendidikan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Guru/Dosen

#### a) Pengertian

Guru atau dosen adalah orang yang bertugas untuk memberikan pendidikan di ruang lingkup akademik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, guru dapat dikatakan sebagai pendidik.

Guru juga dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Imran, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

---

1 Suparlan, 2008. *Menjadi Guru Efektif*. Jakarta: Grasindo, hlm. 12.

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

### ***b) Peran***

Sebagai seorang pendidik, guru memiliki peran yang krusial dalam proses pembelajaran, karena guru dibutuhkan oleh peserta didik untuk membimbing dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki.

Mulyasa (2007) mengidentifikasi sedikitnya ada 19 peran guru dalam pembelajaran, yaitu, guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansivator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.<sup>2</sup> Ke-19 peran guru tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### ***1 - Sebagai Pendidik***

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.

---

2 Mulyasa, 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 37.

## ***2 - Sebagai Pengajar***

Guru membantu peserta didik yang masih berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.

## ***3 - Sebagai Pembimbing***

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

## ***4 - Sebagai Pelatih***

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih.

## ***5 - Sebagai Penasehat***

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang.

### **6 - Sebagai Pembaharu (Inovator)**

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik.

### **7 - Sebagai Model dan Teladan**

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan dari peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggapnya sebagai guru.

### **8 - Sebagai Pribadi**

Sebagai individu yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Guru sering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal

### **9 - Sebagai Peneliti**

Pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan

berbagai penelitian, yang didalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu, guru adalah seorang peneliti

### **10 - Sebagai Pendorong Kreativitas**

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut.

### **11 - Sebagai Pembangkit Pandangan**

Guru harus terampil berkomunikasi dengan peserta didik di segala umur dalam mengembangkan peran ini. Para guru perlu dibekali dengan ajaran tentang hakekat manusia dan setelah mengenalnya akan mengenal pula kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Guru tahu bahwa ia tidak dapat membangkitkan pandangan tentang kebesaran Tuhan kepada peserta didik jika ia sendiri tidak memilikinya.

### **12 - Sebagai Pekerja Rutin**

Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan.

### **13 - Sebagai Pemindah Kemah**

Pemindah kemah yang dimaksud yakni membantu peserta didik meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami. Guru dan

peserta didik bekerjasama dalam mempelajari cara baru, serta meninggalkan kepribadian yang telah membantunya mencapai tujuan dan menggantinya sesuai dengan tuntutan masa kini.

#### ***14 - Sebagai Pembawa Cerita***

Guru, dengan menggunakan suaranya, memperbaiki kehidupan melalui puisi, dan berbagai cerita tentang manusia. Guru tidak takut menjadi alat untuk menyampaikan cerita-cerita tentang kehidupan karena ia tahu sepenuhnya bahwa cerita itu sangat bermanfaat bagi manusia, dan ia berharap bisa menjadi pembawa cerita yang baik.

#### ***15 - Sebagai Aktor***

Sebagai seorang aktor, guru harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun dengan pertimbangan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Penampilan yang bagus dari seorang aktor akan mengakibatkan para penonton tertawa, mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan bisa pula menangis terbawa oleh penampilan sang aktor.

#### ***16 - Sebagai Emansipator***

Guru melaksanakan peran sebagai emansipator ketika peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga, merasa dicampakkan orang lain atau selalu diuji dengan berbagai kesuli-

tan sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri.

### ***17 - Sebagai Evaluator***

Seorang guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat.

### ***18 - Sebagai Pengawet***

Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya karena hasil karya manusia terdahulu masih banyak yang bermakna bagi kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan. Untuk mengawetkan pengetahuan sebagai salah satu komponen kebudayaan, guru harus mempunyai sikap positif terhadap apa yang harus diawetkan.

### ***19 - Sebagai Kulminator***

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran guru sebagai kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator.

## 2. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik di suatu lingkungan belajar. Pendidik memberi bantuan agar peserta didik memperoleh suatu pemahaman, memperoleh pengetahuan baru dan kemahiran yang baru.

Lebih jelas dituliskan oleh Dimiyati dan Mudjiono, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Adapun konsep pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.

---

3 Syaiful Sagala, 2011. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabet, hlm. 6.

### 3. Guru Sebagai Role Model Penguatan Kebangsaan

Guru sebagai salah satu tenaga pendidik mempunyai peran yang strategis untuk melakukan pembinaan rasa nasionalisme pada peserta didik. Mengingat betapa pentingnya pembinaan terhadap generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan, maka salah satu tugas guru adalah membawa dan membimbing peserta didik supaya menjadi warga negara dunia yang tangguh di masa yang akan datang.

Guru bukan hanya sekadar sosok yang menyampaikan ilmu kepada peserta didik, tetapi bisa juga menampilkan sikap diri sebagai seorang guru yang bisa menjadi suri teladan bagi siswanya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas.

Guru harus bisa memanfaatkan perannya dalam usaha perkembangan sikap dan kepribadian peserta didik. Dalam hal ini, guru menjadi salah satu faktor yang turut menentukan karakter kebangsaan generasi muda.

Sikap kebangsaan siswa dapat dibentuk dalam ranah pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan serta pemahaman tentang bagaimana seharusnya sikap yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik. Di sinilah peran guru untuk menumbuhkembangkan aspek afektif siswa, yaitu sesuatu yang sulit diukur secara cepat.

Guru harus benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam merencanakan, mempersiapkan, dan mengelola pembelajaran baik itu di dalam dan di luar kelas dalam upayanya untuk mengembangkan sikap kebangsaan siswa sehingga perannya sebagai guru betul-betul dapat dioptimalkan.

Adapun yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan sikap kebangsaan siswa adalah dengan memberikan materi yang berkaitan dengan penguatan kebangsaan seperti multikultural, pencegahan, dan solusi konflik yang diakibatkan perbedaan, yang lebih penting untuk melakukan penguatan kebangsaan siswa adalah menanamkan nilai-nilai nasionalisme terhadap siswa.

Dalam melakukan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme siswa, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan materi nasionalisme dan mengembangkan kemampuan kritis siswa, karena nilai nasionalisme yang dimiliki siswa hendaknya bukanlah hasil dari indoktrinasi tetapi berdasarkan pemikiran kritisnya sendiri sehingga model dalam pembelajaran yang digunakan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna.

Pada saat proses pembelajaran, hendaknya guru juga menunjukkan sikap yang dapat dijadikan contoh oleh peserta didiknya. Peran strategis yang dimiliki oleh guru untuk memberikan pendidikan tentang nasionalisme

yang juga mencakup tentang konflik. Dapat diajarkan melalui model-model pembelajaran berbasis konflik.

#### 4. Model Pembelajaran untuk Resolusi Konflik

Sebelum membicarakan model pembelajaran yang tepat dalam memberikan resolusi konflik, perlu diketahui apa penyebab konflik itu bisa terjadi sehingga harapannya model pembelajaran yang ditawarkan cocok dengan konflik yang terjadi.

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik biasanya berupa pertentangan yang menimbulkan kekerasan, kerusakan, rasa sakit hati, teror, dan perubahan.<sup>4</sup> Pertentangan atau konflik biasanya dialami oleh individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang saling berinteraksi.

Morton Deutsch seperti dikutip oleh Bunyamin Maftuh (2005) menjelaskan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Artinya, konflik bisa terjadi kepada siapa saja baik antar individu maupun kelompok dan konflik secara alami terjadi dalam tatanan masyarakat.<sup>5</sup>

---

4 Sarwono, S.W., 2005. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 192.

5 Bunyamin Maftuh, 2005. "Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas". Disertasi (tidak diterbitkan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Ada dua macam konflik, yaitu positif dan negatif. Pertanyaannya, mengapa konflik bisa terjadi dan apakah penyebabnya? Menurut Ramlan Surbakti (1992), konflik dapat terjadi karena dua sebab. *Pertama*, konflik kemajemukan horisontal. Konflik ini bersumber dari struktur masyarakat majemuk secara kultural (seperti suku bangsa, agama, daerah, dan ras), serta sosial (perbedaan pekerjaan dan profesi).

*Kedua*, konflik kemajemukan vertikal. Konflik ini bersumber dari struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Konflik ini terjadi karena kepincangan atau kesenjangan dalam distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Setidaknya ada 5 sumber terjadinya konflik di kalangan masyarakat, baik dalam hubungan antar-individu atau antar-kelompok, yaitu:

1. **Kompetisi.** Salah satu pihak berusaha mendapatkan sesuatu dengan cara mengorbankan pihak lain, misalnya menunjukkan keunggulan dalam bidang tertentu dengan cara merendahkan pihak lain.

---

6 Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 151.

2. **Dominasi.** Salah satu orang berusaha mendominasi orang lain, sehingga orang itu merasakan hak-haknya dikebiri.
3. **Kegagalan.** Masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan bersama tidak tercapai.
4. **Provokasi.** Salah satu pihak terus menerus melakukan sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan orang lain.
5. **Perbedaan nilai.** Kedua belah pihak tidak sepakat dengan nilai-nilai yang mereka anut.<sup>7</sup>

Campbell (2002), juga memaparkan beberapa penyebab umum konflik dalam hubungan antar individu atau antar kelompok, antara lain:

1. Adanya kepentingan individu yang tidak sama.
2. Adanya kekuatan atau juga kekayaan yang tidak rata atau tidak sama.
3. Adanya komunikasi yang tidak efektif atau tidak terjadi komunikasi.
4. Adanya perbedaan nilai dan prioritas.

---

7 Rakhmat, J., 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 129.

5. Adanya perbedaan persepsi dalam memandang situasi.
6. Disebabkan pendekatan belajar dan personalitas yang berbeda.<sup>8</sup>

Dengan jelasnya sumber atau penyebab terjadinya konflik yang ada di masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok, maka diperlukan resolusi konflik yang baik untuk menyikapinya. Fisher (2001) menyatakan, resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Mindes (2006), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan yang merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan.<sup>10</sup>

---

8 Campbell, et.al., 2002. *Multiple Intelligences: Metode Terbaru Melesatkan Kecerdasan*. Yogyakarta: Inisiasi Press.

9 Fisher, Simon, et.al. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, hlm. 7.

10 Mindes, Gayle, 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. California: Praeger Publishers, hlm. 24.

Dapat diartikan bahwa resolusi konflik adalah suatu usaha dan cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, meliputi kegiatan bernegosiasi kompromi yang tujuannya adalah selain menyelesaikan masalah yang dipicu oleh perbedaan tetapi juga untuk membangun sebuah hubungan baru yang bertahan lama dan untuk membangun moral yang baik serta hubungan sosial yang damai.

Agar resolusi konflik dapat diterima di kalangan yang berbeda tentunya dibutuhkan inisiatif atau kemampuan untuk resolusi konflik itu sendirinya. Ada beberapa macam kemampuan yang sangat penting untuk menumbuhkan inisiatif resolusi konflik, di antaranya adalah:

### **1. *Kemampuan Orientasi***

Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, serta harga diri.

### **2. *Kemampuan Persepsi***

Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa setiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.

### 3. *Kemampuan Emosi*

Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.

### 4. *Kemampuan Komunikasi*

Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain, memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, dan menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.

### 5. *Kemampuan Berpikir Kreatif*

Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.

### 6. *Kemampuan Berpikir Kritis*

Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.<sup>11</sup>

---

11 Jones, Tricia S. & Kmitta, 2001. *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program*. Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management, hlm. 2.

## 5. Resolusi Konflik di Sekolah

Pendidikan formal mempunyai tugas dan kewajiban dalam membentuk pola siswa yang meliputi pola cipta, rasa, dan karsa. Pengimplementasian program pengajaran resolusi konflik di sekolah-sekolah tentunya sejalan dengan kebijakan dan strategi pendidikan nasional jangka panjang, yaitu mendorong pendidikan perdamaian dan pendidikan global.

Pentingnya pendidikan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kehidupan yang damai juga sejalan dengan salah satu pilar pendidikan yang dinyatakan oleh UNESCO, yaitu *learning how to live together in harmony*. Pendidikan menuju perdamaian ini juga telah dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara sejak tahun 1920. Beliau menekankan tentang pentingnya pendidikan yang didasarkan pada asas tertib dan damai.<sup>12</sup>

Pendidikan resolusi konflik sangat penting untuk diterapkan di sekolah, karena sekolah adalah pusat kehidupan sosial siswa dan di sekolah cenderung terdapat perbedaan yang meliputi: perbedaan etnis, gender, usia, kemewahan, dan kemiskinan.

Keterampilan menjadi lahan subur bagi konflik serta kesempatan untuk pertumbuhan. Jadi, sekolah harus mengubah cara dasar mendidik siswa agar mereka tidak

---

12 Bunyamin Maftuh, 2005, *op.cit.*, hlm. 20.

melawan satu dengan yang lainnya akan tetapi mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik secara konstruktif.<sup>13</sup>

Penerapan resolusi konflik di sekolah tentunya akan terealisasi dengan diterapkannya berbagai pendekatan yang mendukung untuk memperkenalkan resolusi konflik adapun Bodine & Crawford (1994) telah merumuskan empat macam pendekatan dalam pendidikan resolusi konflik sebagai berikut:

### ***1. Process Curriculum Approach***

Pendekatan dalam resolusi konflik yang menyediakan waktu tertentu untuk memberikan pengajaran terkait materi-materi resolusi konflik (negosiasi, mediasi, dan sebagainya) dalam sebuah mata pelajaran, kurikulum, atau rencana pembelajaran yang jelas.

### ***2. Mediation Program Approach***

Adalah program pendidikan resolusi konflik bagi para siswa terpilih (kader) yang telah dilatih tentang resolusi konflik.

### ***3. Peaceable Classroom Approach***

Sebuah pendekatan yang mengajari siswa di sebuah kelas tentang kemampuan dasar, prinsip,

---

13 Frydenberg, Erica, 2005. *A Life and Legacy of Mediation and Conflict Resolution*. Brisbane: Australian Academic Press, hlm. 135.

dan proses dari resolusi konflik. Dalam pendekatan ini, program pembelajaran resolusi konflik diintegrasikan ke dalam mata pelajaran inti (ke-warganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, sastra, seni, dan sebagainya), juga ke dalam strategi manajemen kelas.

#### 4. *Peaceable School Approach*

Pendekatan *peaceable classroom* adalah dasar untuk membangun dan mewujudkan keadaan *peaceable school*. Pendekatan ini bersifat komprehensif atau menyeluruh yang menggunakan resolusi konflik sebagai suatu sistem untuk mengelola kehidupan kelas dan sekolah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada siswa saja, tetapi juga kepada seluruh warga sekolah, seperti guru, konselor, staf & karyawan, kepala sekolah, serta orang tua siswa.<sup>14</sup>

Untuk merealisasikan pendidikan resolusi konflik di sekolah pada ruang kelas dan kepada siswa maka diperlukannya pembelajaran yang tepat dengan menggunakan materi, metode, strategi, dan sebagainya, yang mendukung pengintegrasian resolusi konflik dalam pembelajaran.

---

14 Bodine & Crawford, 1994. *Creating the Peaceable School, Comprehensive Program for Teaching Conflict Resolution: Program Guide Champaign*. Illinois: Research Press, hlm. 27.

Pembelajaran pada dasarnya merupakan sebuah upaya yang sistematis dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, efektif tidaknya suatu proses pembelajaran sangat tergantung dari seberapa jauh peserta didik tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya.

Ada banyak cara untuk mengenalkan siswa dalam mengelola konflik secara konstruktif, salah satunya adalah dengan mengajak siswa untuk mengidentifikasi sebab-sebab umum konflik dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat.

Dalam hal ini, Campbell (2002) menawarkan 6 langkah model pembelajaran resolusi konflik baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Langkah-langkah tersebut merupakan model efektif yang cocok digunakan di dalam kelas ketika terjadi konflik. Keenam langkah manajemen konflik model tersebut ialah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama: mengenalkan dan mendefinisikan konflik.
2. Langkah Kedua: memikirkan solusi yang mungkin digunakan.
3. Langkah Ketiga: mendiskusikan solusi yang potensial.

4. Langkah Keempat: memilih solusi terbaik.
5. Langkah Kelima: membuat rencana untuk menerapkan solusi itu.
6. Langkah Keenam: menerapkan kemudian mereview dan memperbaiki solusi tersebut.<sup>15</sup>

Model pembelajaran resolusi konflik dipilih untuk menyelesaikan masalah perbedaan dari akar atau bawah dan target dari bawah ini adalah para generasi muda atau siswa. Model pembelajaran resolusi konflik di sini dapat memberikan sejumlah jalan keluar atau solusi kepada guru untuk mengoptimalkan pembelajaran sehingga menjadi menarik, berkualitas, baik secara proses maupun produknya, dan bermakna bagi peserta didik.

Sebagai contoh adalah cara merancang program pembelajaran yang berorientasi pada siswa, cara mengelola kelas sehingga pembelajaran berbasis masalah atau PBM menjadi aktif-kreatif, cara memberikan layanan belajar, dan bagaimana melakukan evaluasi PBM yang komprehensif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas proses ataupun hasilnya.

Pada model resolusi konflik, belajar dan membelajarkan merupakan dua sisi saling melengkapi satu sama lainnya. Model pembelajaran resolusi konflik sebagai model

---

<sup>15</sup> Campbell, *et.al.*, 2002, *loc.cit.*

pembelajaran, yang dikembangkan oleh kalangan pemerhati *civic education* di kawasan Amerika dan Eropa Barat, menawarkan suatu rancangan *instructional planning* yang sarat dengan “*chance*” dan “*promise*” agar siswa dapat belajar dengan maksimal dan penuh makna.

Adapun proses penerapan model resolusi konflik ini adalah melalui pengajuan masalah dalam bentuk simulasi dan kesempatan untuk belajar sambil bermain. Di sini siswa akan memiliki kesempatan belajar yang luas dan mendalam dibawah arahan dan fasilitas guru. Guru tidak lagi menjadi otoritas tunggal pembelajaran tetapi lebih banyak berfungsi sebagai mediator dan fasilitator pembelajaran bagi siswa.

Model pembelajaran resolusi konflik yang diintegrasikan pada pembelajaran PKn memiliki keunggulan, yaitu dengan *pola peers tutoring*, siswa dapat mempelajari materi pelajaran secara maksimal dan dapat secara otomatis melatih dan mengembangkan *skill social* dan etika moral kemasyarakatan selama pembelajaran berlangsung melalui permainan yang disepakati bersama.

Penerapan model dalam pembelajaran PKn, adalah sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang selama ini dihadapi dalam PBM. Hal ini dikarenakan guru tidak menjadi *central of focus*, tetapi hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator. Sementara siswa menjadi sentral pembelajaran, dalam arti siswa tidak lagi menjadi objek

tetapi siswa menjadi subjek pembelajaran sehingga penerapan model resolusi konflik dalam pembelajaran PKn membuat siswa termotivasi untuk belajar.

Penerapan model resolusi konflik pada pembelajaran PKn tidak bisa dilepaskan dengan dimensi atau aspek pembelajaran lainnya. Pembelajaran PKn mengintegrasikan pembelajaran resolusi konflik tetapi tidak harus menggunakan model PBM atau pembelajaran berbasis masalah, melainkan dapat pula diintegrasikan ke dalam model pembelajaran lainnya seperti model pembelajaran *role playing*, portofolio, PBL atau *Problem Based Learning*, *inquiry*, diskusi, dan lainnya, di mana di dalamnya mengandung sistem pembelajaran yang berorientasi pada masalah tetapi juga melahirkan solusi yang baik.

Model pembelajaran resolusi konflik juga dapat diterapkan dalam pembelajaran multicultural. Pembelajaran multikultural adalah pembelajaran yang dilandasi perbedaan sehingga harapannya adalah ketika pembelajaran multikultural mengintegrasikan model pembelajarannya resolusi konflik, siswa akan sadar bahwa perbedaan yang melimpah tidak akan menghilangkan rasa kebersamaan, kebangsaan, dan rasa nasionalisme.

## **B. Praktisi**

Dalam konsep praktisi yang dimaksud adalah pemodelan nyata dari pejabat publik untuk pejabat publik

## 1. Pengertian Pejabat Publik

Istilah “pejabat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “pegawai pemerintah yang memegang jabatan (negara/pimpinan)”. Lebih lanjut dalam KBBI juga disebut istilah “pejabat negara”, artinya “orang yang memegang jabatan penting di pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara.”

Nugroho (2008) menyebutkan, pejabat publik dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, di antaranya yaitu:

1. Pejabat legislatif, yaitu Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pejabat yudikatif, yaitu Pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
3. Pejabat eksekutif, yaitu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Menteri dan pejabat pemerintah setingkat Menteri.
  - c. Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - d. Duta Besar.
  - e. Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

4. Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Pejabat lembaga publik semi-negara, termasuk di antaranya: lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU), juga badan-badan regulator infrastruktur publik, seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.
6. Pejabat administratif, yaitu:
  - a. Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II).
  - b. Pejabat struktural daerah propinsi (Eselon I dan II).
  - c. Pejabat struktural daerah kabupaten/kotamadya (Eselon II dan III).
  - d. Para pejabat hubungan masyarakat pemerintah.
  - e. Pejabat pimpinan pelaksana di tingkat bawah (camat, kepala desa/lurah).<sup>16</sup>

---

16 Riant Nugroho, 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai Fifth Estate: Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 64.

Sementara itu dalam UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa pejabat negara adalah “pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan, pejabat negara terdiri atas:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPA
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK
7. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri
8. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
9. Gubernur dan Wakil Gubernur

10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
11. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sementara dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan dalam Pasal 1 Point 1, bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 2, yang termasuk dalam penyelenggara negara meliputi:
2. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara
3. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara
4. Menteri
5. Gubernur
6. Hakim
7. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan

8. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan berbagai pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pejabat publik tidak terbatas pada pengertian pejabat negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu top manajer yang menyelenggarakan urusan negara dan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis termasuk kebijakan yang mengikat terhadap masyarakat (publik).

Kebijakan yang mengikat masyarakat biasanya diambil oleh pimpinan puncak satuan organisasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, seperti kepala LPND, kepala badan, kepala dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan camat, lurah, maupun kepala desa.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan pejabat publik sementara/pejabat publik pengganti adalah:

1. Pejabat publik pengganti (sementara) yang disebabkan karena pimpinannya (gubernur, bupati atau walikota) berhalangan karena sesuatu hal, seperti meninggal dunia, tersangkut masalah hukum dan sebagainya sehingga pejabat tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga jalannya

roda pemerintahan dilanjutkan oleh seorang wakil (gubernur, bupati atau walikota) sampai selesai masa tugasnya;

2. Pejabat publik pengganti (sementara) yang disebabkan adanya pemekaran wilayah atau daerah, sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjuk seorang pejabat (gubernur, bupati atau walikota) yang berasal dari birokrat;
3. Pejabat publik pengganti (sementara) yang disebabkan karena jabatan tersebut sedang ditinggalkan sementara oleh pemegang jabatan, seperti cuti, menjalankan ibadah haji, mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga untuk menjalankan roda organisasi perlu ditunjuk seorang pejabat sementara atau lebih dikenal dengan pejabat pelaksana harian (plh.);
4. Pejabat publik pengganti (sementara) yang disebabkan karena jabatan tersebut tidak ada pejabatnya atau kosong sehingga untuk menjalankan roda organisasi perlu ditunjuk seorang pejabat sementara atau lebih dikenal dengan pejabat pelaksana tugas (plt.).

## **b. Pejabat yang Berwenang Terhadap Resolusi Konflik**

Pejabat yang berwenang terhadap resolusi konflik terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 3:

1. Menteri berwenang mengkoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik secara nasional.
2. Gubernur berwenang mengkoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala provinsi.
3. Bupati/Walikota berwenang mengkoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik skala kabupaten/kota.

Selanjutnya dijelaskan tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagai berikut:

- 1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

#### **Pengarah**

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

#### **Ketua**

- Menteri Dalam Negeri

**Wakil Ketua I**

- Kepala Kepolisian Republik Indonesia

**Wakil Ketua II**

- Panglima Tentara Nasional Indonesia

**Wakil Ketua III**

- Jaksa Agung Republik Indonesia

**Wakil Ketua IV**

- Menteri Sosial

**Wakil Ketua V**

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

**Wakil Ketua VI**

- Menteri Kesehatan

**Wakil Ketua VII**

- Menteri Keuangan

**Wakil Ketua VIII**

- Menteri PPN/Bappenas

**Wakil Ketua IX**

- Kepala Badan Intelijen Negara

**Sekretaris**

- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,  
Kementerian Dalam Negeri

**Wakil Sekretaris I**

- Kabaharkam Polri

**Wakil Sekretaris II**

- Kasum Tentara Nasional Indonesia

**Wakil Sekretaris III**

- Jaksa Agung Muda Intel Kejaksaan RI

**Wakil Sekretaris IV**

- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial

**Wakil Sekretaris V**

- Dirjen pada Kemendikbud terkait Penanganan Konflik Sosial

**Wakil Sekretaris VI**

- Dirjen pada Kemenkes terkait Penanganan Konflik Sosial

**Wakil Sekretaris VII**

- Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas

**Wakil Sekretaris VIII**

- Deputy II Badan Intelijen Negara

**Anggota**

- Unsur pejabat kementerian atau lembaga pemerintah pusat terkait sesuai kebutuhan.
- 2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
  - 3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan sekretariat pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 12 juga menyebutkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikannya, dan mengawasi penanganan konflik secara Nasional
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya
4. Melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 13 menyebutkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi sebagai berikut:

- 1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

**Ketua**

- Gubernur

**Wakil Ketua I**

- Sekretaris Daerah Provinsi

**Wakil Ketua II**

- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)

**Wakil Ketua III**

- Pangdam/Danrem/Kepala Satuan TNI wilayah setempat

**Wakil Ketua IV**

- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)

**Wakil Ketua V**

- Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda)

**Sekretaris**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi

**Wakil Sekretaris I**

- Ka. Biro Ops Polda

**Wakil Sekretaris II**

- Asops Kodam/Kasrem

**Wakil Sekretaris III**

- As Intel Kejati

**Anggota**

- Pejabat SKPD provinsi dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.

- 2) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- 3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan sekretariat pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Sedangkan Pasal 14 menyebutkan, tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan

6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 15 menyebutkan bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota memiliki susunan keanggotaan, terdiri dari:

**Ketua**

- Bupati/Walikota

**Wakil Ketua I**

- Sekda Kab/Kota

**Wakil Ketua II**

- Kapolres/ta/tabas

**Wakil Ketua III**

- Dandim/Kepala Satuan TNI wilayah setempat

**Wakil Ketua IV**

- Kajari

**Sekretaris**

- Kaban Kesbangpol Kab/Kota

**Wakil Sekretaris I**

- Kabag Ops Polres/ta/tabas

**Wakil Sekretaris II**

- Kasi Ops Kodim

**Wakil Sekretaris III**

- Kasi Intel Kejari

### **Anggota**

- Pejabat SKPD Kab/kota dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.
- 1) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
  - 2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 16 menyebutkan tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;

4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial terdapat pada Pasal 17 yang berbunyi:

- 1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan setiap tahun.
- 2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan:
  - a) pencegahan konflik;
  - b) penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
  - c) pemulihan pascakonflik.

Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **c. Peran Nyata Pejabat Publik dalam Resolusi Konflik**

Pejabat publik merupakan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak dan memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi tiga syarat yaitu: *Pertama*, bahwa dia adalah pegawai pemerintah; *Kedua*, menjabat sebagai pimpinan; dan *Ketiga*, bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.

Peran ada apabila ada kedudukan, jadi peran merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi, peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Peran nyata dari pejabat publik disini maksudnya adalah suatu tindakan, keputusan, ataupun perilaku yang menunjukkan keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung seseorang dalam pemerintahan dalam situasi

tertentu. Situasi tertentu maksudnya adalah pada kondisi genting untuk memutuskan, mengambil tindakan, dalam situasi pertikaian maupun pembuatan kebijakan.

Peran pejabat publik di sini lebih difokuskan kepada polisi yang ada di bidang hukum, guru/kepala sekolah yang ada di bidang pendidikan, kepala desa yang ada di masyarakat. Peran-peran pejabat publik tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Polisi**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik sosial oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi:

*Pertama*, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik.

*Kedua*, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.

*Ketiga*, kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Penanganan konflik sosial terkait sangat kuat dengan dimensi kolektivitas, maka peran penegakan hukum dan HAM yang dijalankan oleh Polri dibantu oleh TNI dan pemerintah sedapat mungkin dipadukan dengan peran-peran Polri dengan strategi Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*). Hal ini dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian masalah (*problem solving*), yakni peran pengamanan dan penertiban masyarakat, serta peran polisi untuk perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Selain bertugas untuk menangani berbagai tindak kejahatan (*repressive policing*), polisi juga harus lebih besar perhatiannya terhadap penanganan masalah konflik sosial dan sumber-sumber konflik. Ini bisa diterapkan dengan menganalisa problem-problem sosial sebagai masalah *problem oriented policing*.

Peran nyata yang telah dilakukan oleh polisi ini contohnya adalah ketika ada tawuran yang terjadi antar siswa ataupun warga sekitar, polisi berperan dalam mengamankan lingkungan, meleraikan, menghentikan, dan menyelesaikan tawuran di kantor polisi.

## 2. Guru

Peran guru sangat penting dan strategis untuk menyelesaikan konflik di sekolah. Untuk dapat menyelesaikan dan mengelola konflik ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, mulai dari pencegahan, penyelesaian, pengelolaan, resolusi, hingga transformasi konflik.

Dari beberapa hal itu, langkah pencegahan dan transformasi atau penyelesaian pascakonflik memegang peran cukup signifikan. Intervensi yang dapat dilakukan guru dalam persoalan konflik tersebut yang cukup penting adalah pencegahan dan transformasi penyelesaiannya.

Peran nyata guru di sekolah dalam resolusi konflik ini biasanya dilakukan oleh guru BK (Bimbingan dan Konseling) di mana ketika ada murid yang berkelahi diselesaikan dan dilerai oleh guru yang mengetahui, guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan guru BK.

Tetapi, dalam resolusi konflik yang ada di sekolah yang tidak dapat diselesaikan oleh guru ataupun BK, maka akan melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin yang ada di sekolah.

Kepala sekolah dapat menciptakan iklim komunikasi yang harmonis dan kondusif di sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemberian kesempatan kepada guru untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama yang menyangkut pemecahan masalah/ konflik

yang terjadi di sekolah dalam penyusunan program kerja dan kebijakan sekolah, maupun dalam mengawal proses dan hasil keputusan bersama.

Untuk mencegah adanya konflik di sekolah, peran guru dirasa sangat tepat di mana guru dapat memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran untuk meminimalisir terjadinya konflik antar siswa.

### **3. Kepala Desa**

Peran pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya.

Pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah kepala desa di mana kepala desa merupakan “pejabat publik” serta perangkatnya sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dalam melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kepala desa dituntut untuk lebih tanggap dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah warganya, kepala desa harus bersifat netral dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus memihak.

Adapun peran nyata kepala desa di sini yaitu contohnya peristiwa yang terjadi di Desa Basaan, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, pada akhir tahun 2013 yang lalu. Saat itu, terjadi insiden antar warga. Pertikaian yang terjadi antar warga desa itu pada mulanya yang disebabkan oleh anak remaja di mana pertikaian ini hampir menjurus kepada pertikaian antar agama.

Sebagai contoh adalah seperti keadaan yang terjadi di Desa Basaan di mana terdapat dua golongan pemeluk agama yang dominan, yaitu Kristen dan Islam. Dua golongan ini mempunyai komunitas yang terpisah dan tempat tinggal yang terpusat. Untuk warga muslim, biasanya dikenal dengan masyarakat yang tinggal di daerah bawah, sedangkan umat kristiani menetap dan terpusat di daerah atas.

Dalam hal ini, peran kepala desa sebagai pemerintah desa serta pribadi yang dihargai, disegani, dan dihormati yang ada di desa adalah mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua kubu sehingga terciptanya kedamaian didalam desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan budaya yang berkembang di Minahasa, kepala desa adalah orang yang disebut sebagai *Hukum Tua* (biasa disingkat dengan *Kuntua*), dan masih dianggap sebagai jabatan budaya. Dalam pengertian ini

maksudnya adalah, jabatan tersebut dihargai karena pengabdian seseorang sehingga untuk menjadi *Hukum Tua* ia harus lebih banyak berkorban dalam pengabdiannya.



# 4

## **KESETARAAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURALISME: MEMBANGUN KOMUNI- KASI LINTAS BUDAYA UNTUK MENGUATKAN KEBANGSAAN**

**K**esetaraan dalam masyarakat multikulturalisme di berbagai diskusi tradisional sering dikatakan mengandung suatu kelemahan mendasar karena menggunakan teori yang salah tentang kodrat manusia. Hal ini sebagaimana para filsuf memahami manusia dengan

menggunakan teori substantif tentang kodrat manusia dan memperlakukan kebudayaan sebagai sesuatu yang seakan tidak penting atau hanya sebagai kepentingan marjinal.

Kebudayaan pada esensinya merupakan sesuatu yang krusial dalam membangun rasa kebersamaan yang akan mewujudkan rasa kebangsaan. Secara umum, banyak asumsi yang berkembang bahwa manusia dibangun oleh dua susunan watak.

*Pertama*, manusia diciptakan sesuai dengan citra Tuhan, yakni makhluk yang memiliki jiwa, bisa memahami dirinya, memiliki kemampuan, kebutuhan umum, atau manusia diciptakan satu susunan alamiah yang sama.

*Kedua*, manusia diciptakan dari hal-hal yang bervariasi dari satu budaya yang lain dan dari individu ke individu lainnya. Bentuk tersebut digunakan untuk membangun kemanusiaan mereka secara ontologis menjadi hak khusus. Manusia diciptakan untuk menjadi setara karena memiliki watak yang sama atau mirip dan kesetaraan diperlukan karena perlakuan mereka dalam cara yang kurang lebih sama dan memberi sekumpulan hak yang kurang lebih sama.

Manusia berbagi sejumlah kemampuan dan kebutuhan umumnya, namun kebudayaan yang berbeda menentukan dan menstrukturkan perbedaan tersebut. Kebudayaan itu pun mengembangkan kemampuan dan kebutuhan baru yang mereka miliki.

Selama manusia serupa sekaligus berbeda, manusia harus diperlakukan setara. Pandangan yang mendasarkan pada kesejajaran manusia, bukan pada keseragaman, namun lebih pada kemampuan untuk saling mempengaruhi antara keseragaman dan keberbedaan, manusia akan membangun keberbedaan dalam konsep kesetaraan, dan mematahkan kesamaan tradisi kesetaraan dengan persamaan yang kebal terhadap distorsi kelompok monis. Kesetaraan melibatkan kebebasan atau kesempatan untuk menuntut kita mempertimbangkan kesamaan beserta keberbedaan.

Ketika perbedaan tidak relevan, kesetaraan akan menghasilkan perlakuan yang seragam atau identik, perbedaan-perbedaan tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda. Hak-hak yang setara tidak berarti hak-hak yang identik. Kesetaraan atas penghormatan melibatkan tidak saja penolakan atas keberbedaan yang tidak relevan, namun adanya pengakuan atas perbedaan-perbedaan yang sah dan relevan dalam hal-hal sensitif secara kultural.

Kesetaraan diartikulasikan pada sejumlah tingkatan yang saling terkait. Pada level paling dasar, kesetaraan melibatkan penghargaan dan hak. Pada level sedikit lebih tinggi, melibatkan kesempatan, kepercayaan diri, harga diri, dan lainnya. Pada level yang lebih tinggi lagi, yang diperlukan adalah untuk pengembangan manusia.

Sensitivitas terhadap keberbedaan memiliki kaitannya dengan masing-masing tingkatan ini. Oleh karena itu, penghormatan terhadap seseorang mencakup menempatkan diri dalam latar belakang yang berlawanan, secara simpatik masuk ke dalam dunia pemikirannya, dan menafsirkan tingkah laku sesuai dengan pemaknaan yang dianut oleh sistem.

Sebuah contoh sederhana untuk dapat menggambarkan kesetaraan dalam hal sensitivitas. Diumpamakan ada calon pekerja asing yang akan bekerja di Inggris secara sistematis memperoleh nilai rendah karena kebiasaan pekerja asing yang memperlihatkan penghormatan dengan tidak menatap mata yang mewawancarai, dan membawa pewawancara tersebut pada kesimpulan bahwa orang asing tidak jujur, licik, dan cenderung membuktikan bahwa orang asing tidak bisa dipercaya.

Dengan gagalnya menghargai sistem makna dan praktek-praktek budaya para calon pekerja asing tersebut, pewawancara memberi perlakuan yang tidak setara dari sesama calon dari warga kulit putih. Pemakluman yang keliru muncul karena mereka beranggapan bahwa semua sistem makna identik yang bisa diprediksi berubah sesuai sistem mereka.

Selain itu, contoh yang sangat dekat dengan kalangan muda generasi penerus bangsa, yaitu mahasiswa, adalah adanya perbedaan perlakuan dikarenakan perbedaan budaya cara bicara. Sebagai contoh:

Seorang mahasiswa dari Ternate menempuh sekolah S2 di Yogyakarta. Dengan bahasa logat khas Ternate, mahasiswa ini berkomunikasi dengan teman-teman di lingkungan kampus. Akan tetapi, karena kurang adanya sensitivitas dalam hal kesetaraan, perbedaan logat dalam berbicara ini akan menimbulkan perbedaan perilaku antar teman lainya. Hal ini yang menjadikan perbedaan kebudayaan memiliki dua sisi mata pisau, satu sisi dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dengan banyak keberagaman, akan tetapi jika salah dalam menyikapi akan menjadi alat pemecah yang paling ampuh bagi sebuah bangsa.

Kehancuran akan sangat mudah terjadi apabila kita tidak bisa secara kritis meng-universalkan kategori-kategori dan norma-norma kebudayaan kita. Sebagaimana konsep penghormatan yang setara, kesetaraan kesempatan perlu diinterpretasikan dalam tingkah laku yang sensitif budaya. Dalam masyarakat multikultur, banyak elemen budaya yang apabila tidak ditanggapi dengan baik akan menimbulkan perpecahan.

Sebagai contoh sederhana adalah pakaian sering menjadi ajang perjuangan yang paling panas dan keras. Sebagai sebuah simbol identitas budaya yang padat dan kelihatan, pakaian menjadi suatu masalah penting bagi para individu yang terlibat, tetapi demi alasan tersebut, pakaian mengakibatkan segala perilaku kecemasan dan kemarahan, yang secara tidak sadar telah berkembang di masyarakat pada umumnya.

Contoh kasus, perbedaan pakaian dalam satu umat muslim saja bisa menjadi perdebatan yang sangat panas. Dewasa ini kita melihat bahwa umat muslim, khususnya perempuan, memiliki banyak simbol-simbol pakaian yang berbeda. Hal ini seakan memberikan isyarat bahwa perbedaan pakaian mereka membedakan pula status serta tingkat keimanan dalam dirinya.

Kita bisa melihat di tempat publik, kampus, bahkan di rumah, terdapat perbedaan dalam memaknai kaidah berpakaian yang sebenarnya wajib dijalankan oleh umat muslim. Dengan banyak fenomena perbedaan pakaian dalam diri umat muslim yang biasa dikenal dengan istilah aliran *jilbob* dan aliran *Syar'i*, maka menimbulkan perbedaan dalam bersikap.

Perbedaan ini sejatinya tidak perlu dijadikan sebuah permasalahan yang besar apalagi memberikan perlakuan yang berbeda, karena pakaian adalah bagian dari kebudayaan yang merupakan tempat pembentukan watak bagi suatu kelompok sosial tertentu.

Perbedaan pakaian yang ada dalam masyarakat memang tidak perlu ditanggapi dengan buru-buru untuk langsung diterima dalam masyarakat multikultur yang kaya akan budaya. Hal ini bertujuan untuk dijadikan sebagai sebuah indikator mengenai apakah masyarakat tersebut merasa nyaman dengan dirinya sendiri di tengah

perbedaan yang ada, atau masyarakat yang merasa berbeda dirinya dengan budaya lingkungannya memutuskan untuk mengikuti arus budaya di tempat barunya.

Dengan demikian, kesetaraan tidak harus dimaknai bahwa segala sesuatunya harus sama, tidak ada yang berbeda, akan tetapi kesetaraan itu dapat dimaknai sebagai proses dimana masing-masing individu dapat mengembangkan kebudayaannya tanpa menghancurkan kebudayaan lainnya.

Perubahan kebudayaan merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial, kebiasaan, dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan komunikasi merupakan cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Budaya dan komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam tema ini akan mencoba untuk mengungkapkan segmen-segmen komunikasi lintas budaya yang terjadi di kalangan generasi penerus bangsa khususnya mahasiswa. Hal ini diharapkan melalui kampus dapat terciptanya penguatan-penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah era globalisasi serta masyarakat multikulturalisme.

## A. Implikasi Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultur

Permasalahan-permasalahan yang ada untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam sebuah masyarakat multikultur, beberapa kesimpulan penting dapat dibuat. Ketika kita mempertimbangkan perbedaan-perbedaan budaya, sebagaimana mestinya, perlakuan yang sama cenderung mencakup perlakuan yang berbeda atau dibedakan, yang menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana kita meyakinkan bahwa perlakuan yang dibedakan tidak sama dengan diskriminasi atau pengistimewaan.

Tidak ada jawaban yang mudah untuk hal ini. Seperti biasanya, akan terlihat bahwa perlakuan-perlakuan yang berbeda terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok dianggap setara jika mencerminkan cara-cara untuk mewujudkan hak yang sama, kesempatan atau dalam hal apa saja yang hendak diperlakukan secara setara, dan jika hasilnya tidak ada pihak-pihak yang terkait menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Seorang Sikh yang diizinkan membawa keris kecil dan seorang Kristen yang dilarang diperlakukan berbeda tetapi setara karena mereka berdua sedang menjalankan hak yang sama dalam cara-cara yang berbeda, dan karena orang Kristen tidak memberikan keuntungan atau kerugian kepada orang Sikh.

Seorang gadis Asia yang pernikahannya dinyatakan tidak sah ketika dilangsungkan di bawah ancaman peng-

asingan oleh orang tua, dan seorang gadis kulit putih yang pernikahannya berlangsung dalam situasi yang sama tidak dinyatakan tidak sah, kedua diperlakukan dengan hal yang sama meski dengan cara yang berbeda, karena mereka menjadi sasaran aturan umum yang mengancam ketidakabsahan perkawinan.

Dalam kasus-kasus seperti itu, kita perlu mempertimbangkan sifat dan tujuan hak atau aturan yang terkait, dan memperlihatkan bahwa perlakuan yang berbeda dibenarkan sesuai dengan keadaan masing-masing.

Ketidaksetujuan cenderung muncul pada kedua keadaan tersebut, terutama yang disebut terakhir. Karena tidak ada jalan untuk memecahkan kasus tersebut secara meyakinkan, penerapan kesetaraan silang budaya selalu akan tetap rentan terhadap tuduhan yang berlawanan menyangkut pengistimewaan atau diskriminasi terhadap suatu kelompok khusus.

Dalam masyarakat multikultur, seseorang mungkin kadang-kadang perlu melangkah lebih jauh dan memberi tidak hanya hak-hak yang berbeda, tetapi juga hak-hak tambahan kepada beberapa kelompok atau individu. Ini diperlakukan untuk menyetarakan mereka dengan yang lainnya, atau untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif yang berharga seperti integrasi politik, keselarasan sosial, dan semangat keanekaragaman kultural.

Apabila beberapa kelompok telah lama dipinggirkan atau ditindas, kurang percaya diri dan peluang untuk berpartisipasi sederajat dengan masyarakat arus utama, atau menjadi sasaran asimilasi yang sangat kuat, kita mungkin perlu memberi mereka hak-hak yang tidak ada pada orang lain, seperti perwakilan khusus atau yang tidak berbanding dalam parlemen, kabinet, dan lembaga-lembaga pemerintahan lain, dan hak untuk berkonsultasi dan bahkan mungkin sebuah hak untuk menolak undang-undang yang berhubungan dengan mereka.

Tujuan hak-hak tambahan semacam itu adalah untuk memasukkan kelompok-kelompok terkait ke dalam arus utama masyarakat dan memberikan substansi pada prinsip kewarganegaraan yang setara.

Barangkali ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang menderita trauma karena sejarah belakangan ini, atau merasa tidak nyaman secara kultural, atau berada di bawah ancaman tertentu. Dengan demikian, kita perlu memberi hak-hak yang tidak ada dalam kaum mayoritas untuk meyakinkan mereka, meningkatkan keselarasan sosial, memberi kedudukan dalam stabilitas politik negara dan mempertahankan satu rasa memiliki yang sama.

Terlahir dengan trauma perpecahan negara dan kekerasan antar kelompok yang menyertainya, Konstitusi India dengan bijak menetapkan untuk memberi hak-hak tambahan kepada kelompok-kelompok minoritas.

Di Kanada dan Amerika Serikat, masyarakat-masyarakat pribumi menikmati hak-hak negatif dan positif yang diperlukan untuk melindungi jalan hidup mereka yang tidak ada dalam masyarakat lain.

Beberapa negara seperti Australia, Kanada, dan India memberikan nilai yang tinggi pada keanekaragaman kultural dan memberi sumber daya dan hak yang lebih kepada kelompok-kelompok minoritas untuk membantu mereka berkembang dan memberi sumbangan kepada penciptaan sebuah masyarakat yang kaya dan majemuk.

Dalam kasus ini dan yang lainnya, kelompok minoritas jelas diuntungkan dan dalam beberapa hal diistimewakan, tetapi hal itu dibenarkan jika dilakukan dalam kepentingan masyarakat yang lebih besar. Macam-macam hak dan sumber daya tambahan dapat dengan mudah menimbulkan perasaan ketidakadilan dan kemarahan diantara kaum mayoritas, dan bahkan menjadi selubung untuk membeli dukungan suara kaum minoritas. Oleh karena itu, mereka harus diberi manakala dibenarkan, dan harus menyatakan dan menjelaskan tujuannya dengan gamblang.

Kaum liberal, yang bersikeras bahwa semua negara harus menikmati hak-hak yang sama, mengalami permasalahan akibat hak-hak tambahan yang diberikan kepada kelompok minoritas, dan tidak setuju terhadapnya, ataupun memberi pembenaran dengan berdasarkan hak-hak

tersebut bertujuan untuk menyetarakan kelompok-kelompok dengan sesama warga negara lainnya.

Tanggapan pertama mencerminkan kejayaan dogma tentang kehati-hatian dan kadang-kadang sebuah petunjuk tentang ketidakselarasan atau ketidakteraturan sebuah masyarakat multikultur.

Tanggapan kedua memberikan pemahaman moral dan politik tetapi keliru tentang landasan bagi hak-hak tersebut. Ketika hak-hak tambahan kelompok minoritas ditujukan untuk menyetarakan mereka dengan yang lainnya, hak-hak lain dirancang untuk meningkatkan tujuan-tujuan kolektif yang bermanfaat seperti keselarasan sosial, keanekaragaman kultural, dan satu rasa memiliki yang sama. Seperti halnya kesetaraan, hak-hak tambahan tersebut juga merupakan nilai-nilai penting dan kita perlu menyeimbangkan tuntutan-tuntutan mereka yang bersaing.

Meski masyarakat memiliki kewajiban untuk memperlakukan seluruh warga dengan sederajat, kemampuan untuk mempraktekkannya sungguh terbatas. Mereka memiliki bahasa yang dominan, dan tidak ada bahasa yang netral secara kultural. Sementara menghargai bahasa minoritas dan membantu para pengguna bahasa memperoleh kompetensinya dalam bahasa dominan, masyarakat tidak selalu dapat memberikan sebuah status publik yang sama.

Setiap masyarakat juga memiliki struktur budaya yang diwariskan secara kultural yang menjelaskan perilaku kehidupan publiknya. Pada saat masyarakat itu memiliki satu kewajiban untuk mengubah struktur tersebut guna mengakomodasikan tuntutan yang sah dari kelompok minoritas, masyarakat tersebut tidak mampu melakukannya melampaui satu titik tertentu tanpa kehilangan koherensinya dan menimbulkan kesesatan, kecemasan, dan bahkan penolakan yang menyebar luas.

Hal ini cenderung mengarah kepada perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok minoritas dalam wilayah-wilayah tertentu, yang sekalipun mempunyai semua tujuan baiknya, masyarakat tersebut hanya mampu menjangkau sedikit saja.

Dalam masyarakat Barat, hari Minggu merupakan waktu untuk beristirahat demi alasan-alasan kultural dan keagamaan yang nyata. Hal ini merugikan kaum muslim, yang tidak seperti umat Kristen, tidak bisa bergabung dalam shalat pada hari Jumat, hari suci mereka.

Meskipun ketersediaan harus ditetapkan untuk mengakomodasi pekerja-pekerja muslim dan mengurangi ketidaksetaraan, adalah cukup sulit untuk melihat bagaimana ketidaksetaraan dapat dihilangkan sepenuhnya tanpa memperbaiki struktur budaya yang berlaku dan menanggung beban sosial dan finansial yang sangat besar.

Ketidaksetaraan yang tidak terelakkan terjadi bahkan dalam bentuk yang lebih parah dalam bidang kehidupan lainnya. Ketidaksetaraan mana yang bisa dihilangkan, dengan biaya apa, dan siapa yang harus menanggungnya cenderung menjadi sebuah perdebatan. Karena sering tidak ada satu jalan pun yang adil atau rasional untuk memecahkan perdebatan tersebut, yang terbaik dari ketidaksetaraan tersebut diselesaikan dengan diskusi, negosiasi, dan kompromi.

## **B. Potret Komunikasi Lintas Budaya di Kalangan Mahasiswa**

Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah dikenal sangat heterogen dalam berbagai aspek, seperti adanya keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Di lain pihak, perkembangan dunia yang sangat pesat saat ini dengan mobilitas dan dinamika yang sangat tinggi, telah menyebabkan dunia menuju ke arah “desa dunia” (*global village*) yang hampir tidak memiliki batas-batas lagi sebagai akibat dari perkembangan teknologi modern.

Oleh karenanya, masyarakat (dalam arti luas) harus sudah siap menghadapi situasi-situasi baru dalam konteks keberagaman kebudayaan atau apapun namanya. Interaksi dan komunikasi harus pula berjalan satu dengan yang lainnya, adakah sudah saling mengenal atau pun belum pernah sama sekali berjumpa apalagi berkenalan.

Dalam berkomunikasi dengan konteks keberagaman, kebudayaan kerap kali menemui masalah atau hambatan-hambatan yang tidak diharapkan sebelumnya. Misalnya saja dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai atau norma-norma masyarakat dan lain sebagainya. Padahal syarat untuk terjalinnya hubungan itu tentu saja harus ada saling pengertian dan pertukaran informasi atau makna antara satu dengan lainnya. Dari itu mempelajari komunikasi dan budaya merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya seperti yang dikatakan Edward T. Hall bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi.

Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara “horizontal” dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu.

Hubungan sosial dengan orang lain, merupakan pertukaran pesan berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa berkomunikasi

akan terisolasi. Pesan-pesan itu mengemukakan lewat perilaku manusia. Ketika kita berbicara, kita sebenarnya sedang berperilaku. Ketika berjabat tangan, tersenyum, cemberut, menganggukan kepala, atau memberikan suatu isyarat ke orang lain, kita juga sedang berperilaku.

Perilaku-perilaku ini merupakan pesan-pesan dan pesan-pesan itu digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang. Porter dan Samovar mengatakan bahwa sebelum perilaku tersebut dapat disebut pesan, perilaku itu harus memenuhi dua syarat:

*Pertama*, perilaku harus diobservasi oleh seseorang, dan *Kedua*, perilaku harus mengandung makna. Dengan kata lain, setiap perilaku yang dapat diartikan adalah suatu pesan.

Implikasi dari konsep perilaku, yakni: *Pertama*, kata setiap menunjukkan kepada kita, baik perilaku verbal ataupun nonverbal dapat berfungsi sebagai pesan. *Kedua*, perilaku mungkin disadari ataupun tidak disadari.<sup>1</sup>

Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tanpa menyadarinya, terutama kalau perilaku kita itu bersifat nonverbal. *Ketiga*, dari pesan perilaku ini adalah bahwa

---

1 Deddy Mulyana & Jalaludin Rakhmat, 2006. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 12-13.

kita sering berperilaku tanpa sengaja. Perilaku yang tidak disengaja menjadi pesan bila seseorang melihat dan menangkap suatu makna dari perilaku yang ditunjukkan.

Fenomena yang pertama terjadi antara mahasiswa Malaysia dengan mahasiswa Indonesia, yaitu kita tahu bahwa tipikal mahasiswa Malaysia sama seperti kita juga, tidak jauh beda, karena bangsa serumpun, sama-sama orang Melayu.

Hal menarik adalah bahasanya, sulit bagi kita memahami *cakap* Melayu mahasiswa Malaysia ini, perlu *interpreter* untuk memahami. Bahasa Melayu bisa terdengar aneh di telinga kita, mungkin sama anehnya bahasa kita di telinga mahasiswa Malaysia.<sup>2</sup>

Orang asing di Indonesia sering menyebut kata “bahasa” kalau mereka ingin mengatakan bahwa mereka hanya sedikit bisa berbahasa Indonesia (*I can speak Bahasa, but a little*). Padahal, yang dimaksud dengan “bahasa” dalam kalimat itu adalah Bahasa Melayu. Orang Barat sering menganggap Bahasa Melayu sama dengan Bahasa Indonesia.

Fenomena yang kedua terjadi antara mahasiswa Jepang dengan mahasiswa Indonesia, yaitu salah satu ciri

---

2 Tuti Bahfiarti. 2012. *Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Malaysia di Kota Makassar (Intercultural Communication Malaysian Students in Makassar)*. Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa-PEKOMMAS Volume 15 No. 2 Makassar: Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Hasanuddin.

khas dari budaya masyarakat Jepang adalah budaya malu yang telah mengakar pada diri mereka. Ungkapan rasa malu tercermin di antaranya pada sikap dan tutur katanya.

*Ojigi* adalah konsepsi dari bentuk penghormatan orang Jepang dengan cara membungkukkan badan, ini adalah implikasi bahwa orang Jepang merasa hormat dan sungkan kepada orang yang ditemuinya. Kekhasan budaya malu bangsa Jepang salah satunya dapat dilihat dari pergaulan yang tidak saling menghina orang lain.

Pengakuan akan eksistensi setiap individu menjadi cermin bahwa pribadinya pun akan selalu diakui orang lain. Inilah keseimbangan moral yang selalu dijunjung orang Jepang. Sifat individualis mahasiswa Jepang sangat berbeda dengan mahasiswa Indonesia. Individualis bagi mahasiswa Indonesia berarti bersifat “keakuan” sedangkan individualis bagi mahasiswa Jepang mengacu pada perasaan kelompok atau kolektif yang berarti “keki-taan”.

Contohnya: kita mengatakan, “Saya pikir Anda belum mengerti dengan maksud saya”. Dalam bahasa Inggris “*I think, you don't know what I mean*”. Maka orang Jepang hanya akan mengatakan, “*watashi no ito ga wakaranai to omoimasu*”, *watashi no ito* (maksud saya), *wakaranai* (mengerti), *omoimasu* (pikir).

Kita bisa melihat bahwa cara pengungkapan seperti ini muncul karena adanya perasaan tidak mau atau sungkan untuk terkesan menonjolkan diri, namun bukan berarti mereka merendahkan dirinya sendiri. Sikap seperti ini mencerminkan orang Jepang tidak ingin secara langsung bersinggungan perasaan dengan perasaan lawan bicaranya meskipun ada pertentangan dengan dengan dirinya, orang Jepang pun kaku dan pekerja keras.

Dalam hal ini, orang Jepang masih menghargai privasi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sedangkan bagi orang Indonesia, individual berarti bukan grup, sehingga hal ini bisa membedakan persepsi pribadi seseorang tentang apa itu persamaan, kebebasan, privasi, dan di mata dunia orang Indonesia sering diseteoripkan sebagai orang-orang “anarkis”, konservatif-primitif, dan orang yang kurang menghargai waktu serta menganut cara berpikir “bagaimana nanti”, bukannya “nanti bagaimana”.

Dari dua contoh kasus di atas, kita harus menyadari bahwa setiap kali kaum etnis masing-masing berkumpul bersama dan mulai berbicara hal-hal yang kurang baik mengenai etnis lain, mereka akan berkumpul dan melihat rendah akan etnis yang satunya.

Akan tetapi, jika kita berteman atau meluangkan waktu kita bersama 1-2 orang dari kaum etnis lain, kita

akan menyadari cukup banyak persamaan dan akan dapat mengerti jalan pikiran mereka seperti apa.

Ketika mahasiswa-mahasiswa dari budaya yang berlainan berkomunikasi, sering terjadi *miss communication* dan kesalahan dalam hal penafsiran adalah hal yang lazim ditemui. Dalam hal ini, komunikasi lintas budaya bisa terjadi dalam konteks komunikasi manapun. Komunikasi dan saling pengertian antarbudaya sangat penting untuk melakukan hubungan lintas budaya dengan tidak merasa budaya asing lebih unggul dibandingkan dengan budaya Indonesia.

Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dan bila budaya beragam, pastinya beragam pula praktik-praktik komunikasi. Budaya juga bisa mempengaruhi orang yang berkomunikasi dalam masyarakat yang multikultural.

Untuk mengurangi adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi dikarenakan adanya perbedaan latar belakang yang berbeda dengan tempat asal, perlu adanya pembangunan sebuah jembatan antarbudaya (*ras, agama, sosio-cultural*), berlandaskan persamaan dan persaudaraan yang sangat penting dan dibutuhkan antar kedua belah pihak dikarenakan manusia tidak dapat berdiri sendiri.

Budaya dan komunikasi menjelma menjadi diri dalam kerangka pola interaksi masyarakat multikultur. Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen adalah

anggota budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pola artinya adalah “gambar, corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur”.

Apabila pengertian pola dikaitkan dengan perilaku komunikasi disatukan maka dapat diartikan pola perilaku komunikasi adalah bentuk dasar cara komunikasi individu dengan individu dengan memberikan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dari gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Pola komunikasi lintas budaya dapat terjadi di dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan pada masyarakat multikultur. Dalam proses interaksi dan berkomunikasi terjadi saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Fenomena global saat ini sedang berlangsung interaksi dalam lingkungan kita, yang memaksa kita untuk memperhatikan budaya yang baru.

Tersebarnya suatu kebudayaan atau masuknya unsur budaya Indonesia ke dalam mahasiswa asing melalui interaksi sosial, yaitu bentuk konkret dari interaksi tersebut adalah komunikasi. Karena masing-masing dari mereka mempunyai budaya, otomatis interaksi yang berlangsung mengakibatkan saling transfer budaya.

Dalam berkomunikasi antara mahasiswa asing dan mahasiswa lokal sering mengalami perbedaan dalam bahasa (aspek verbal dan non verbal), persepsi, sikap, kebiasaan, nilai-nilai, gaya hidup (*life style*), maupun pola berpikir.

Oleh karena itu, budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Cara berinteraksi dan komunikasi sangat tergantung pada budaya kita yaitu bahasa, aturan dan norma kita masing-masing. Ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang lain, kita dihadapkan dengan bahasa-bahasa, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berbeda.

Adanya proses interaksi yang semakin intensif antara mahasiswa asing dengan mahasiswa lokal sebagai akibat adanya tujuan dan kepentingan yang sama yaitu kegiatan mahasiswa di dalam dinamika kehidupan mahasiswa, akan mempertemukan individu-individu yang tadinya hanya bergaul dengan sesama budayanya, akan bergaul dengan individu lain dari budaya Indonesia dalam kerja sama untuk mencapai tujuannya.

Hambatan atau masalah dalam proses interaksi lintas budaya antara lain meliputi: etnosentrisme, *stereotype*, prasangka dan diskriminasi. Sulit bagi kita untuk memahami komunikasi mereka bila kita sangat etnosentrik. Dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ada interaksi sosial antar individu, maupun kelompok.

Sebelum mengalami interaksi, maka individu yang memasuki arena sosial yang baru memerlukan adaptasi dan kontak lingkungan. Tanpa komunikasi, masyarakat manusia tidak akan berjalan.

Maka, melalui pola komunikasi antarbudaya, diharapkan berbagai kesalahpahaman tentang persepsi perbedaan antar budaya dapat dikurangi dan agar dapat memahami bahasa (yang merupakan salah satu cara ber ekspresi) dari perilaku budaya orang lain.

Perilaku mereka dapat mengandung makna, sebab perilaku tersebut dipelajari dan diketahui, dan juga perilaku itu terikat oleh budaya. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan personal dalam berhubungan dan berinteraksi antar individu sehingga paling tidak bisa menepis perbedaan nilai-nilai (yang berhubungan dengan pandangan) tersebut untuk dapat berkomunikasi sejajar. Jadi, komunikasi benar-benar merupakan jalur utama masyarakat manusia.

Dalam konsep *strangers* (orang asing), berasal dari sosiologis Jerman, Simmel (1950), yang diterbitkan pada tahun 1908 di Jerman dalam *essay* klasik berjudul "Der Fremde" (*The Stranger*), Simmels memandang *stranger* sebagai orang yang memiliki kualitas yang berlawanan dari situasi dekat dan jauh pada saat yang sama.<sup>3</sup>

---

3 Gudykunst, Willian, B & Kim, Young Yun, 1992. *Communicating with Strangers: An Approach to Iterculcural Communication*. Edisi ke-2. New York: McGraw-Hill, hlm. 8.

Konsep *strangers* juga membahas proses komunikasi yang meliputi hal khusus tentang proses adaptasi yakni, yang meminta orang asing untuk menjadi bagian dalam sebuah budaya baru dan tidak dikenal.

Adaptasi ini meliputi situasi-situasi perubahan, seperti: profesi, perkawinan, usia, divori, transisi dari bersekolah menjadi bekerja, dan mulai masuk di perguruan tinggi. Melalui proses sosialisasi, kita belajar dan mengenali “semua faktor dan proses yang membuat manusia masuk ke dalam kehidupan lingkungan orang lain.”

Fokus pendekatan *strangers* adalah bukan hanya pola komunikasi lintas budaya yang dilakukan, bukan hanya proses adaptasi terhadap budaya baru yang dilakukan, atau bagaimana efektivitas dalam berkomunikasi dengan orang asing, tetapi juga apa yang menjadi pendukung dan penghambatan dalam komunikasi lintas budaya tersebut.

Dikhawatirkan bahwa ketika resosialisasi berlangsung secara praktis maka orang asing seperti berada di dalam penjara. Hal yang sering terjadi juga adalah bahwa budaya baru mempunyai dampak yang substansial terhadap perilaku psikologis dan sosiologis orang asing.

Dalam analisis *strangers*, secara umum pengenalan terhadap pola-pola lintas budaya dilakukan melalui interaksi. Maka, orang asing mengenali pola budaya

masyarakat Indonesia dan kemudian membangun hubungan dengan realitas budaya baru melalui komunikasi.

Menurut Young Yun Kim, secara bertahap imigran belajar menciptakan situasi-situasi dan relasi-relasi yang tepat dalam masyarakat pribumi sejalan dengan berbagai transaksinya yang ia lakukan dengan orang-orang lain.

Pada saatnya nanti, imigran akan menggunakan cara-cara berperilaku masyarakat pribumi untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola yang diterima masyarakat setempat; penyesuaian diri yang ia lakukan dengan lebih teliti. Perubahan-perubahan perilaku juga terjadi ketika seorang imigran menyimpang dari pola-pola lama tersebut dengan pola-pola baru dalam budaya pribumi.<sup>4</sup>

Dalam pola dan proses interaksi dengan orang yang berbeda, budaya diperlukan perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Ketika kita berusaha untuk berkomunikasi dengan orang asing, pemahaman kita tentang interaksi orang asing yang dibatasi oleh perilaku nonverbal. Karena persepsi dari perilaku nonverbal pada umumnya fenomena kesadaran. Fenomena ketidaksadaran dalam komunikasi nonverbal adalah “dimensi tersembunyi” dari budaya. Dikatakan tersembunyi karena kecuali pesan verbal, pesan nonverbal dihubungkan konteks lapangan komunikasi.<sup>5</sup>

---

4 Deddy Mulyana & Jalaludin Rakhmat, 2006. *op.cit.*, hlm. 138.

5 *Ibid.*, hlm. 90.

### **C. Proses Adaptasi Lintas Budaya dalam Masyarakat Multikultur**

Pada dasarnya, hal-hal yang terdapat dalam proses adaptasi merupakan proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagian dari pola komunikasi yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya untuk berinteraksi dengan orang lain.

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikator dengan komunikasinya. Inti dari sebuah proses komunikasi adalah adanya kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan tersebut antara komunikator dan komunikan.

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia, bahkan seluruh kehidupan seorang manusia di isi dengan komunikasi. Komunikasi adalah bagaimana manusia itu berhubungan dengan manusia lainnya dan membentuk dan menjalin berbagai macam hubungan di antara mereka.

Komunikasi adalah pembawa proses sosial. Ia adalah alat yang manusia untuk mengatur, menstabilkan, dan memodifikasi kehidupan sosialnya. Proses sosial bergantung pada penghimpunan, pertukaran, dan penyampaian pengetahuan.

Pada gilirannya, pengetahuan bergantung pada komunikasi.<sup>6</sup> Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik dan tindakan.

Hampir setiap waktu di dalam kehidupan manusia selalu diwarnai oleh aktivitas komunikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang vital setelah kebutuhan dasar yang lain seperti makan, tidur, dan dalam melakukan interaksi sosial.

Komunikasi merupakan kebutuhan yang vital, maka sudah pasti manusia membutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi, segalanya akan menjadi lancar, dan sebaliknya apabila dalam hidupnya manusia tidak berkomunikasi, selalu menyendiri dan tidak pernah berinteraksi sudah pasti akan kehilangan gairah hidup.

Untuk memahami interaksi antarbudaya, terlebih dahulu kita harus memahami komunikasi manusia. Memahami komunikasi manusia berarti memahami apa yang terjadi, apa yang dapat terjadi, akibat-akibat dari apa yang terjadi dan akhirnya apa yang dapat kita perbuat untuk mempengaruhi dan memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian tersebut.

---

6 *Ibid.*, hlm. 16.

Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang-orang lainnya dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi.<sup>7</sup>

Porter & Samovar dalam Deddy Mulyana & Jalaludin Rakhmat (2006) menyebutkan bahwa ada 8 unsur khusus komunikasi dalam konteks sengaja, yakni sebagai berikut:

1. **Sumber (*source*)**. Orang yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Kebutuhan ini berkisar dari kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu, hingga kebutuhan berbagai informasi atau untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok.
2. **Penyandian (*encoding*)**. Kegiatan internal seseorang untuk memilih dan merangsang perilaku verbal dan nonverbalnya yang sesuai dengan aturan tata bahasa dan sintaksis guna menciptakan suatu pesan.
3. **Pesan (*message*)**. Hasil dari perilaku menyandi adalah adalah pesan, baik pesan verbal maupun nonverbal.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

4. **Saluran (*channel*)**. Adalah penghubung antara sumber dan penerima.
5. **Penerima (*receiver*)**. Orang yang menerima pesan sebagai akibatnya menjadi terhubung dengan sumber pesan. Penerima bisa yang dikehendaki atau mungkin yang tidak dikehendaki sumber.
6. **Penyandian balik (*decoding*)**. Proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber.
7. **Respons penerima (*receiver respons*)**. Menyangkut apa yang penerima lakukan setelah ia menerima pesan. Respons bisa beranekaragam bisa minimum hingga maksimum. Respons minimum keputusan penerima mengabaikan pesan, sebaliknya yang maksimum tindakan penerima yang segera, terbuka dan mungkin mengandung kekerasan. Komunikasi dianggap berhasil bila respons penerima mendekati apa yang dikehendaki oleh sumber.
8. **Umpan balik (*feed back*)**. Informasi yang tersedia bagi sumber yang memungkinkannya menilai keefektifan komunikasi yang dilakukannya.<sup>8</sup>

---

8 *Ibid.*, hlm. 14-16.

Kedelapan unsur tersebut, hanyalah sebagian saja dari faktor yang berperan selama suatu peristiwa komunikasi.

Adaptasi terjadi dalam dan melalui komunikasi, dan lebih jauh lagi hasil penting dari adaptasi adalah identifikasi dan internalisasi dari simbol yang signifikan tentang masyarakat tuan rumah.

Karena secara umum pengenalan terhadap pola-pola budaya dilakukan melalui interaksi, maka orang asing mengenali pola budaya masyarakat tuan rumahnya dan kemudian membangun hubungan realitas budaya baru melalui komunikasi.

Pada saat yang sama, kemampuan komunikasi orang asing berpengaruh pada adaptasinya secara baik, serta proses adaptasi itu merupakan hal penting yang digunakan untuk mendapatkan kapasitas komunikasi sebagaimana dilakukan oleh masyarakat tuan rumah.

Situasi yang dihasilkan dari perpindahan ke budaya baru salah satunya, yakni pertukaran pelajar. Motivasi untuk beradaptasi sangat tergantung pada tingkat kepermanenan (lama atau sebentar/tetap atau tidak tetap) mereka dalam mendiami lingkungan tersebut.

Dalam hal ini, perpindahan orang asing dari negara asal ke negara baru adalah permanen. Karena mereka harus tinggal dan menjadi anggota dari masyarakat tuan

rumah, maka mereka harus berfokus pada hubungan mereka dengan lingkungan baru seperti cara penduduk asli beradaptasi.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa akan beradaptasi dengan masyarakat asli ketika dia melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa di kampus, tetapi akan hidup lagi seperti budayanya sendiri ketika berkomunikasi dengan orang yang sama asalnya atau budayanya.

Berger & Leukman dalam Gudykunst & Kim (1992), menyatakan bahwa sosialisasi dan enkulturasi adalah bentuk dasar dari pengungkapan perilaku dasar manusia yang diinternalisasi dari cepat atau lambatnya kita mempelajari “ciri-ciri orang lain” dan kemudian menjadi “satu-satunya dunia yang ada”.

Proses lain yang menentukan proses adaptasi adalah yang disebut resosialisasi atau akulturasi, yakni ketika orang asing yang telah tersosialisasi di dalam budayanya dan kemudian berpindah ke tempat baru dan berinteraksi dengan lingkungan untuk jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Terkait proses adaptasi ini, orang asing secara gradual mulai mendeteksi pola-pola baru tentang pikiran dan perilaku serta menstruktur secara personal tentang adaptasi-adaptasi yang relevan dengan masyarakat tuan

---

9 Gudykunst, William, B. & Kim, Young Yun, 1992. *op.cit.*, hlm. 90.

rumah. Yang menentukan dalam proses ini adalah kemampuan kita untuk mengenal perbedaan dan persamaan yang ada pada lingkungan baru.

Seiring dengan berjalannya proses akulturasi dalam konteks adaptasi terhadap budaya baru, maka beberapa pola-pola budaya lama yang tidak dipelajari (*unlearning*) juga terjadi, paling tidak pada tingkat bahwa respons baru diadopsi dalam situasi yang sebelumnya telah menjadi perbedaan. Proses adaptasi ini disebut dekulturasi.

Pada saat terjadi proses dekulturasi dan akulturasi, maka pendatang baru secara gradual telah melakukan proses adaptasi. Orang asing dapat ditekan untuk menyesuaikan diri dengan peran yang dibutuhkan tetapi tidak dapat dipaksa untuk menerima nilai-nilai tertentu.

#### **D. Kebangsaan Indonesia dalam Multikulturalisme**

Indonesia sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ibarat sebuah kain, negeri ini merupakan sebuah mozaik yang dirajut oleh aneka tenun kebangsaan yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa (etnik) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia.

Jika corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai penekanannya pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok suku bangsa yang beranekaragam kebu-

dayaannya ini tidak dikelola secara tepat, maka akan mudah melahirkan potensi-potensi destruktif.

Ibarat dua sisi mata uang, masyarakat majemuk, selain merupakan khazanah dan kekayaan, juga berpotensi menghasilkan gesekan dan *stereotype* antar etnik. Jika tidak dikelola secara harmonis atau dibiarkan tanpa arah, bangunan ke-Indonesia-an yang jelas, bisa memicu munculnya stigma sosial dan konflik terbuka.

Dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang tidak kecil. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, tantangan yang dihadapi makin kompleks dan berat.

Salah satu tantangan besar sebagai negara bangsa (*nation state*), adalah kecenderungan merebaknya gesekan dan konflik antara entitas kemajemukan kebangsaan sendiri. Padahal entitas ini merupakan inti penyusun *nation state*. Ibarat kain, *nation state* dirajut dari aneka kain tenun kebangsaan yang dirangkai menjadi entitas kesatuan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Hal ini bisa dilihat dari beberapa parameter berikut: *pertama*, adanya keragaman kultural (multikultural); *kedua*, aliansi etnik; dan *ketiga*, terorganisir secara etnik.

Dalam kehidupan masyarakat yang multietnis atau multikultural seperti Indonesia, kemajemukan tidak saja menyiratkan adanya perbedaan-perbedaan, tetapi juga di

dalamnya mengandung interaksi timbal-balik antar anggota masyarakat. Pada masyarakat seperti itu problem yang biasanya timbul adalah sulitnya mencapai kesepakatan dalam meletakkan landasan sistem politik yang mapan.

Sebagai *nation state*, Indonesia masih berkuat pada aneka masalah krusial dan pekerjaan rumah yang mendasak dituntaskan. Sejumlah masalah mendasar yang kait-mengait, seperti masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, adalah aneka persoalan yang tidak dapat dianggap enteng.

Ketimpangan penghasilan dan pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik dapat bermuara pada kecemburuan dan konflik sosial. Begitu juga soal kemiskinan dan pengangguran harus dituntaskan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Kemajemukan bagi bangsa kita agaknya dapat dikatakan sudah menjadi takdir sosial sejarah bangsa. Entitas kebangsaan yang multikultural ini merupakan kekayaan sekaligus potensi kelemahan, manakala tidak dikelola dengan tepat. Sebagai sebuah entitas kebangsaan, melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan menjadi tenun yang merajut kesatuan bangsa.

Secara etnisitas yang majemuk (*plural society*), negeri ini merupakan sebuah masyarakat negara bangsa yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa (etnik) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia.

Jika corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai penekanannya pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok suku bangsa yang beranekaragam kebudayaannya ini tidak dikelola secara tepat, maka akan mudah melahirkan potensi-potensi destruktif.

Hal ini berpotensi menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh *stereotype* dan prasangka negatif. Jika ini dibiarkan tanpa arah bangunan ke-Indonesiaan yang jelas, bisa memicu munculnya stigma sosial antar suku bangsa. Pada urutannya, kondisi demikian akan dengan mudah melahirkan cara pandang perbedaan secara diskriminatif antar suku bangsa itu sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam merajut kebangsaan Indonesia, yang multikultural dan multi-etnik suku kebangsaan, adalah tenun nasionalisme yang selalu mengalami pasang naik dan pasang surut. Bahkan nasionalisme diprediksikan akan lenyap sejalan dengan semakin sebuah negara menjadi modern. Terutama nasionalisme yang berbingkai multi-etnisitas suku bangsa. Ada beberapa tesis yang dewasa ini berkembang seiring dengan memudarnya ideologi nasionalisme kebangsaan.

*Pertama*, ada kecenderungan bahwa hasrat untuk bersatu sebagai bangsa (*will to nationalist*) hanyalah salah satu tahap menuju sebuah negara modern yang liberal dan demokratis di mana kepentingan-kepentingan yang lebih pragmatik dan individual akan lebih mendominasi corak kehidupan masyarakat dibanding kebutuhan akan penegasan diri dalam sebuah identitas nasional.

*Kedua*, kehendak nasionalisme kerap kalah seiring dengan menguatnya politik identitas di mana orang mengidentifikasi diri tidak lagi dengan sebuah bangsa, tetapi dengan sebuah etnis atau agama tertentu.

Runtuhnya Uni Soviet menjadi negara-negara bagian yang saling menegasikan semakin menguatkan tesis ini di mana suatu negara bangsa yang multikultural akan menghadapi nasib serupa menjadi negara merdeka berdasarkan kesamaan etnis dan agama.

Beberapa kasus menguatnya tuntutan pemisahan diri dan separatisme di tanah air dewasa ini setidaknya juga mengindikasikan kita tengah menghadapi tantangan nasionalisme yang serius.

Dalam konteks pemikiran semacam ini, apakah tren kebangsaan yang merajut nasionalisme kita sejatinya juga tengah mengalami ancaman dan kejatuhan? Tentu saja waktu dan sikap kenegaraan kita bersama yang akan menentukan dan menjawab pertanyaan tersebut.

Maksudnya, kemampuan pemerintah dalam merespon situasi kekinian menyangkut ancaman nasionalisme dan negara bangsa Indonesia, akan turut mewarnai dan menentukan perjalanan sejarah bangsa kita ke depan.

Namun mengingat bahwa negara bangsa yang di-proklamasikan pada 17 Agustus 1945 ini, bukanlah suatu entitas yang instan, maka agaknya tesis tentang kejatuhan Uni Soviet juga belum tentu memiliki varian akar penyebab yang sama.

Entitas dan tenun kebangsaan kita sejatinya lahir dari sebuah proses yang tidak semata-mata sejarah elite melainkan didukung dan lahir dari gerakan sosial kerakyatan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, di tengah masyarakat hidup aneka organisasi kepemudaan yang menjadi pilar lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928, seperti sebut saja Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan sebagainya.

Meskipun demikian, *nationalist passion* yang sifatnya etnis dan kedaerahan ini justru semakin melemah sejalan dengan mengentalnya kesadaran akan keIndonesiaan sebagai sebuah “identitas baru” pengalaman kolektif berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah.

Perjuangan organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) di Indonesia dan Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda yang eksplisit memperjuangkan

kemerdekaan Indonesia jelas menunjukkan adanya kristalisasi pengalaman keindonesian yang memuncak pada pernyataan tekad satu bangsa, satu tanah air dan satu bangsa Indonesia, tanggal 28 Oktober 1928.

Kesadaran sebagai bangsa merupakan hasil konstruksi atau bentukan mengandung kelemahan internal yang serius ketika kolonialisme dan imperialisme tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Karena itu, nasionalisme kita akan ikut lenyap jika kita berhenti mengkonstruksi atau membentuknya, tanpa harus menyebutnya sebagai sebuah nasionalisme baru.

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Multikulturalisme adalah pendekatan yang multiperspektif dalam merajut tenun kebangsaan kita dewasa ini. multikulturalisme menekankan kesetaraan dan kesederajatan antar etnik.

Menurut Parsudi Suparlan (2002), akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme.<sup>10</sup>

Konsep multikulturalisme itu sendiri tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku

---

10 Parsudi Suparlan, 2002. *Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: YKIK.

bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang, kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan, menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat majemuk.

Membangun multikulturalisme di tengah aneka permasalahan antara kelompok, etnis, suku bangsa dan agama bukanlah pekerjaan yang ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas “merayakan keragaman” dan “kebersamaan” belaka. Apalagi tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi yang bersifat rasis, etnis, dan fanatis, terhadap religiusitas.



# 5

## OPTIMALISASI RUANG-RUANG AKADEMIK

### A. Ruang Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila semua fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran ada. Ruang pembelajaran merupakan komponen yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran, ruang pembelajaran di sini yang dimaksud adalah bukan sekadar ruang kelas saja tetapi ruang kelas dengan segala isinya yang mendukung proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun ruang pembelajaran ini meliputi:

## 1. Kelas

Kelas merupakan salah satu komponen di sekolah yang di dalamnya terdiri dari sekelompok peserta didik yang heterogen atau beranekaragam, mulai dari perbedaan fisik, perbedaan psikis, perbedaan tipe belajar peserta didik dan terdiri dari berbagai sarana belajar yang mendukung.<sup>1</sup>

Kelas dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu kelas dalam arti sempit dan kelas dalam arti luas. Dalam arti sempit, kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah peserta didik berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Sedangkan kelas dalam arti luas adalah sebagai suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah sebagai satu kesatuan diorganisasikan menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai tujuan.<sup>2</sup>

Arikunto dalam Ali Rohmad (2009) menjelaskan bahwa pengertian kelas adalah sekelompok peserta didik yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang

---

1 Novan Ardy Wiyani, 2013. *Manajemen Kelas*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 20.

2 Haidari Nawawi, 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: PT Haji Mas Agung, hlm. 116.

sama dari guru yang sama.<sup>3</sup> Pengertian kelas akan lebih spesifik apabila terdapat kata “ruang” di depannya, yaitu menjadi ruang kelas.

Ruang dalam perspektif bangunan adalah rongga yang dibatasi oleh permukaan bangunan. Ruang meliputi ruang dalam dan ruang luar. Ruang dalam dibatasi oleh tiga bidang yaitu sebuah lantai, sebuah dinding, dan sebuah langit-langit. Sedangkan ruang luar adalah ruang yang terjadi dibatasi oleh alam. Dalam arti luas, ruang kelas dapat dipahami sebagai ruang yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar bangunan yang dijadikan tempat berlangsungnya proses pembelajaran.<sup>4</sup>

Di sekolah, ruang kelas berfungsi sebagai sarana dalam proses pembelajaran peserta didik. Agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan, perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas. Pengaturan dan penataan ruang kelas hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar.

Pendapat lain menurut Asep Hery Hernawan (2006), dalam pengaturan ruang kelas hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

---

3 Ali Rohmad, 2009. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Teras, hlm, 69.

4 Euis Karwati & Doni Juni Priansa, 2014. *Manajemen Kelas*. Bandung: Alfabeta, hlm. 45.

- a. Ukuran dan bentuk kelas
- b. Bentuk serta ukuran bangku dan meja peserta didik
- c. Jumlah peserta didik dalam kelas
- d. Jumlah peserta didik dalam setiap kelompok
- e. Jumlah kelompok dalam kelas
- f. Komposisi peserta didik dalam kelompok (seperti siswa pandai dengan siswa kurang pandai, laki-laki dan perempuan).<sup>5</sup>

Ruang kelas merupakan prasarana yang wajib dimiliki oleh perguruan tinggi dalam rangka mendukung proses perkuliahan. Dalam membuat ruang kelas di perguruan tinggi harus memperhatikan standar minimal.

Berdasarkan rancangan Permendikbud tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2013, dalam menentukan ruang kelas perkuliahan (ruang kuliah) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan program profesi, 32 (tiga puluh dua) orang untuk program diploma, 20 (dua puluh) orang untuk program magister dan doktor, 10 (sepuluh) orang untuk program spesialis dan subspecialis,

---

<sup>5</sup> Asep Hery Hernawan, 2006. *Pengelolaan Kelas*. Bandung: UPI Press, hlm. 9.

dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m<sup>2</sup>/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m<sup>2</sup>.

- b. Kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/ umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m<sup>2</sup>/mahasiswa.
- c. Paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program sarjana, dan 1 (satu) buah kelas untuk program lainnya.
- d. Dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja kursi dosen, dan media pembelajaran.<sup>6</sup>

## 2. Perpustakaan

Perpustakaan berasal dari kata dasar “pustaka” yang memiliki arti kitab atau buku. sedangkan dalam bahasa Inggris perpustakaan dikenal dengan nama *library* yang berasal dari bahasa Latin, *liber* atau *libri*, yang artinya buku. Dari kata Latin didapat istilah *libraries* yang mempunyai arti tentang buku.

---

6 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2013.

Sedangkan menurut Darmono (2007), perpustakaan berfungsi untuk:

- a. Menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya agar para pengguna perpustakaan dapat memperoleh berbagai informasi untuk memecahkan masalah serta dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Sebagai sarana menerapkan tujuan pendidikan agar para pengguna perpustakaan dapat mengembangkan minat yang telah dimiliki.
- c. Meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai jenis informasi sebagai rekaman budaya bangsa dalam meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu dan secara kelompok.
- d. Menyediakan berbagai jenis informasi sebagai penunjang kegiatan penelitian, informasi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan lembaga.<sup>7</sup>

Saat ini, perpustakaan berkembang pesat dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi informasi.

---

7 Darmono, 2007. *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Suatu Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Jakarta: Gramedia Widiasmara Indonesia, hlm. 3-6.

Dilihat dari perkembangan teknologi informasinya, perpustakaan berkembang dari perpustakaan tradisional, perpustakaan semi tradisional, perpustakaan elektronik, perpustakaan digital, hingga perpustakaan virtual.

Dari pola kehidupan masyarakat berkembang mulai dari perpustakaan desa perpustakaan masjid, perpustakaan pribadi, perpustakaan keliling, dan sebagainya. Jika dilihat dari perkembangan kebutuhan dan pengetahuan sekarang banyak bermunculan istilah perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan anak, perpustakaan sekolah, perpustakaan akademik (perguruan tinggi), perpustakaan perusahaan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Di perguruan tinggi, peran perpustakaan sangat penting dalam menambah daftar referensi baca mahasiswa. Semakin banyak buku referensi yang disediakan pada perpustakaan perguruan tinggi maka akan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa bagi yang membacanya. Hal ini juga akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah sebagai bahan referensi dalam mengembangkan ilmunya.

### 3. Laboratorium

Laboratorium merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan yang berupa ruang tertutup

---

8 Syamsul Arif, 2005. *Manajemen Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: UGM, hlm 1.

atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Nuryani Rustaman (2005), laboratorium merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar.<sup>9</sup>

Pandangan lain yang disampaikan oleh Muhammad Amien (1988) yang memberikan definisi laboratorium sebagai prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unit satu atau lebih dari Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat luas.<sup>10</sup>

Kegiatan laboratorium adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dari materi perkuliahan.

---

9 Nuryani Rustaman, 2005. *Strategi Belajar Mengajar Biologi*. Malang: UM Press, hlm. 78.

10 Muhammad Amin, 1988. *Buku Pedoman Laboratorium dan Petunjuk Praktis Pendidikan IPA Umum (Gen. Science) untuk LPTK*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 1.

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1980 Pasal 29 menyebutkan bahwa laboratorium mempunyai fungsi mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam satu bidang studi dan mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam bidang studi tertentu.

Laboratorium di perguruan tinggi seharusnya menjadi pelengkap di dalam membangun kompetensi lulusannya. Dalam hal ini tidak terlalu jauh dari upaya menyelenggarakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian yang bereputasi nasional, dan lebih tinggi lagi internasional, serta menyediakan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Laboratorium juga wajib memberikan kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran mahasiswa pada ranah keterampilan (*learning to do*) dan ranah kerjasama kooperatif (*learning to live together*).

## **B. Organisasi Mahasiswa**

Organisasi mahasiswa merupakan suatu wadah atau organisasi yang bergerak dibidang kemahasiswaan, yang di dalamnya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam

organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya.<sup>11</sup>

Selanjutnya pengertian organisasi mahasiswa merupakan wadah yang diharapkan mampu menampung seluruh kegiatan kemahasiswaan dan juga merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir atau bernalar secara teratur di luar perkuliahan formal, kemampuan berorganisasi, dan menumbuhkan kepemimpinan.<sup>12</sup>

Organisasi kemahasiswaan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mewujudkan kekuatan penalaran yang secara potensial dimilikinya, kelak apabila mahasiswa menerjunkan dirinya ke masyarakat setelah ia menyelesaikan studinya di perguruan tinggi.

Keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi adalah mahasiswa yang secara aktif menggabungkan diri dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, menyalurkan bakat, memperluas wawasan dan membentuk kepribadian mahasiswa seutuhnya.

Dalam hal ini, mahasiswa yang aktif dalam organisasi diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya,

---

11 Launa, "Gerakan Intelektual dan Aksi Massa Mahasiswa: Refleksi dan Prospekti Peran Politik Mahasiswa Era Orde Baru", dalam *Jurnal Widya*, Nomor 183, 2000, hlm. 32

12 Joesoef, D., 1978. *Normalisasi Kehidupan Kampus dan Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 25.

sehingga kegiatan organisasi tidak menjadi faktor penghambat dalam memperoleh prestasi belajar yang baik. Namun menjadi faktor yang dapat mempengaruhi untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik.

### C. Transformasi Nasionalisme

*Nation* berasal dari bahasa Latin *natio*, yang dikembangkan dari kata *nascor* (saya dilahirkan), maka pada awalnya nation (bangsa) dimaknai sebagai “sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama” (*group of people born in the same place*).

Kata nasionalisme menurut Barruel dalam Ritter (1986) untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka.<sup>13</sup>

Nasionalisme berakar dari sistem budaya suatu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa dikonstruksikan melalui khayalan yang menjadi materi dasar nasionalisme.

---

13 Ritter, Herry, 1986. *Dictionary of Concepts in History*. New York: Greenwood Press, hlm. 286-295.

Sebagai contoh, dalam pandangan Anderson (1999), nasionalisme Indonesia terbentuk dari adanya suatu khayalan akan suatu bangsa yang diikat oleh suatu kesatuan media komunikasi, yakni bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Reva Sonia Izati (2013) yang memaparkan bahwa nasionalisme mengalami perkembangan beragam, yang secara keseluruhan dapat diklarifikasikan menjadi tiga pengertian, yaitu:

*Pertama*, nasionalisme adalah sebuah ideologi sekaligus merupakan satu bentuk dari perilaku (*behaviour*). *Kedua*, nasionalisme adalah sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara kita yang sebangsa dengan mereka dan bangsa lain, antara negara kita dengan negara lain. *Ketiga*, nasionalisme adalah ibarat satu koin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi pertama adalah politik, dan sisi lainnya adalah etnisitas atau rasa kesukubangsaan. Tidak ada nasionalisme tanpa elemen politik, sedangkan substansinya tidak bisa lain kecuali sentiment etnik.<sup>15</sup>

Snyder (1954) mengemukakan sebagai berikut, “*nationalism is primarily concerned with the independence and uni-*

---

14 Grendi Hendrastomo, “Nasionalisme vs Globalisasi: Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern”, dalam *Dimensia*, Volume I, No.1, Maret 2007, hlm. 4.

15 Reva Sonia Izati, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa”, dalam *Jurnal PPKn UNJ Online*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 7.

*ty of the nation.*"<sup>16</sup> Sedangkan menurut Anderson (1999), nasionalisme adalah "... *it is an imagined political community that is imagined as both inherently limited and sovereign.*"<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.

Nasionalisme sebagai sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme sebagai suatu paham tidak bersifat statis tetapi dinamis. Nasionalisme yang merupakan hasil peradaban manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan ruang dan waktu serta situasi dan kondisi yang ada.

Bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam masa kolonial Belanda yaitu saat bersatunya seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dengan tidak memandang individu dari sudut agama, suku, bahasa, etnis dengan munculnya gerakan pemuda yang bernama Boedi Oetomo

---

16 Snyder, Louis, 1954. *The Meaning of Nationalism*. New Jersey: Rutgers University Press, hlm. 148.

17 Anderson, Benedict, 1999. *Imagined Communities: Reflection on The Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition*. London and New York: Verso.

sebagai cikal bakal pergerakan rakyat untuk menumpas koloniaslisme Belanda di tanah air yang dicetuskan oleh kaum muda sebagai bentuk corak nasionalisme. Hall (1993) membagi corak nasionalisme yaitu sebagai berikut:

### 1. Nasionalisme *Resorgimento*

Adalah nasionalisme yang muncul dari bawah. Nasionalisme ini umumnya dipelopori oleh para cendekiawan yang jumlahnya bertambah banyak karena pendidikan. Para terpelajar ini sebagai orang-orang modernis, liberal dan demokrat mendorong terbentuknya integrasi normatif dalam teritorial mereka sebagai negara bangsa (*nation state*) yang liberal dan demokratis.

Faktor lain yang mendorongnya adalah perkembangan ekonomi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial, dari pedesaan ke perkotaan karena proses industrialisasi. Tipe ini berkembang di Eropa pada abad ke18 -19.

### 2. Nasionalisme Integratif

Adalah nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain. Nasionalisme ini mendorong integrasi seluruh aspek kehidupan bangsa dalam rangka menghadapi bangsa-bangsa lain yang menindas.

Contoh nasionalisme seperti ini dikembangkan kaum fasis Italia dan Nazi di Jerman.<sup>18</sup>

Sementara itu, Lind (1994) membagi corak nasionalisme menjadi:

1. **Nasionalisme liberal**, yaitu nasionalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individual dalam suatu negara bangsa yang berlandaskan konstitusi modern.
2. **Nasionalisme il-liberal**, yaitu nasionalisme yang dikembangkan berdasarkan garis agama, atau etnis, seperti di Iran, Pakistan, atau India.<sup>19</sup>

Corak lain adalah pandangan Tilly (1994) yang membedakan corak nasionalisme menjadi dua, yaitu:

1. **Nasionalisme yang dipimpin negara**, dalam arti pemimpin yang berbicara atas nama suatu bangsa menuntut warga negara mengidentifikasi dirinya dengan bangsanya dan mensubordinasikan kepentingan lain pada kepentingan negara.
2. **Nasionalisme yang diusahakan negara**, yaitu nasionalisme perwakilan, di mana negara menem-

---

18 Hall, J. A., "Nationalism : Classified and Explained", dalam *Daudalus*, 122 (3), 1993, hlm. 1-2.

19 Lind, M. "In Defence of Liberal Nationalism", dalam *Foreign Affairs*, 73 (3), 1994, hlm. 87-88.

patkan wakil-wakil rakyat di pusat pemerintahan karena negara sendiri tidak mempunyai kontrol ketat terhadap daerah-daerah yang otonom.<sup>20</sup>

#### D. Sikap Nasionalisme

Saat ini, Indonesia membutuhkan semangat nasionalisme dari warga negaranya yang secara nyata diwujudkan dengan sikap nasionalisme dari setiap individu. Bangsa Indonesia yang besar dengan jumlah penduduknya menempati posisi keempat dunia membuktikan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang melimpah tidak hanya kekayaan alamnya saja.

Akan tetapi, melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang masih jauh dari rasa nasionalisme dengan masih banyaknya kekerasan, tawuran, intoleransi antar umat beragama, kelompok radikal, dan sebagainya.

Adapun cita-cita nasionalisme menurut Hertz seperti dikutip oleh Abdul Choliq Murod (2011), ada empat macam yaitu:

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta solidaritas.

---

20 Tilly, C. "State and Nationalism in Europe 1492-1992", dalam *Theory and Society*, 23 (1), 1994, hlm. 6.

2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dari dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang bersifat anti nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan negara.
3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (*separateness*), pembedaan (*distinctiveness*), individualitas dan keaslian (*originality*).
4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.<sup>21</sup>

Sikap nasionalisme yang kuat dari warga negara akan membentuk suatu kekuatan untuk menghadapi segala macam bahaya yang ada di depannya dengan bersama-sama tidak memandang silsilah seseorang tetapi memandang dari sudut sesama warga negara Indonesia.

Semangat nasionalisme sebagai pokok motivasi yang harus pemerintah lakukan untuk warganya. Nasionalisme merupakan bagian dari identitas masyarakat yang sangat penting agar kehidupan menjadi lebih berharga dalam kehidupan suatu negara, Kevin McDonough mengatakan:

---

21 Abdul Choliq Murod, "Nasionalisme dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVI, No. 2, 2011, hlm. 48.

*Indeed, where nationalism forms a part of people's identity, where it constitutes an important aspect of what makes their life worthwhile – that is, when it is an aspect of the conception of the good—it must be treated with respect even if particular nationalist movements and demands must sometimes be criticized and rejected.<sup>22</sup>*

Seperti apa yang diutarakan oleh pemimpin bangsa Indonesia yang pertama yaitu Bung Karno dalam sidang yang bertajuk “Indonesia menggugat” di depan sidang Belanda, yang menyampaikan tentang semangat nasionalisme. Berikut pernyataan Presiden Soekarno:

...Bagaimana caranya menghidupkan nasionalisme itu? Jalannya ada tiga: Pertama, kami menunjukkan kepada rakyat bahwa ia punya hari dulu, adalah hari dulu yang indah. Kedua, kami menambah keinsyafan rakyat bahwa ia punya hari sekarang, adalah hari yang gelap. Ketiga, kami memperlihatkan kepada rakyat sinarnya hari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji itu.

---

22 McDonough, Kevin, “Beyond Patriotic Education: Locating The Place of Nationalism in The Public School Curriculum”, dalam *Education, Citizenship and Social Justice*, 8 (2), 135–150, 2013, hlm. 143.

Kata Bung Karno, semangat nasionalisme yang menggelora tersebut mempunyai perwujudan terhadap sikap nasionalisme dari proklamator bangsa tersebut yaitu rasa cinta dan bangga dengan Indonesia, rasa memiliki bangsa Indonesia, sikap membela negara dari penjajah. Pentingnya akan sikap nasionalisme yang harus dimiliki warga Indonesia tidak lain untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk yang mengancam keutuhan negara.

Melalui sikap nasionalisme yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, akan membawa bangsa ini ke kejayaan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan founding father bangsa. Sikap nasionalisme terbentuk melalui sebuah perjalanan hidup seseorang, salah satunya dengan pendidikan bela negara. Oleh sebab itu, dari kegiatan bela negara akan mendidik warga masyarakat untuk mengaktualisasikan sikap-sikap nasionalisme yang harus dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan bernegara.

## **E. Pembelajaran Berbasis Nasionalisme**

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam

batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang.

Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara pernah berkata:

“Untuk mendapatkan sistem pembelajaran yang bermanfaat bagi peri kehidupan bangsa, haruslah sistem tersebut disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat.”

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran dalam dunia pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai budaya lokal atau budaya tanah air, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna karena sistem budaya pembelajaran sudah diambil dari nilai-nilai kultur bangsa sendiri,

Ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui serta dalam sistem pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dalam jiwa peserta didik sebagai generasi muda di masa yang akan mendatang. Misalnya pada sekolah Taman Siswa memasukkan budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah, bahkan ada mata pelajaran khusus yang dibuat untuk membangun rasa nasionalisme.

Melalui pembelajaran di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri siswa serta mencetak anak-anak bangsa yang cerdas dan berbudaya.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama antar elemen untuk mendukung program tersebut baik lembaga pemerintah, masyarakat, dan pendidik sebagai pelaku pembelajaran di sekolah untuk menanamkan nasionalisme pada peserta didik, mengingat saat ini begitu banyak arus globalisasi yang masuk dan diadopsi oleh generasi muda sebagai budaya yang modern.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik melalui mata pelajaran PKn. Penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme akan mengembangkan kreativitas peserta didik untuk melakukan kajian-kajian berbagai peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diintegrasikan kepada masing-masing individu sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak yang berpijak pada pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah-sekolah.<sup>23</sup>

## F. Bentuk-bentuk Nasionalisme

Bentuk-bentuk dari nasionalisme sendiri dapat diwujudkan baik dari segi agama, budaya, negara, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk nasionalisme adalah sebagai berikut:

---

23 Novitasari Iriane Rawantina & I Made Arsana, "Penanaman Nilai Nasionalisme dan Patriotisme untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Sidoarjo", dalam *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1, Vol. 1: 39-54, 2013, hlm. 50.

1. **Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil)** adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.
2. **Nasionalisme etnis atau etno nasionalisme** adalah di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
3. **Nasionalisme romantik** adalah bentuk nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik.
4. **Nasionalisme budaya** adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit.
5. **Nasionalisme kenegaraan** adalah variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu

komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.

6. **Nasionalisme agama** adalah nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.<sup>24</sup>

### G. Peran dan Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang paling vital dan strategis dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan menentukan kualitas proses pembelajaran serta hasil belajar yang dialami oleh siswa.

Sebagus dan selengkap apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, kalau tenaga pendidik dan kependidikannya tidak kompeten, maka sarana dan prasarana itu pun tidak akan banyak membantu para siswa dalam melaksanakan proses belajarnya.

Sebagus apapun konsep dan isi kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah, namun apabila tenaga pendidik dan kependidikannya tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik, maka kurikulum itupun tidak akan berdampak apa-apa pada siswa.

---

24 Retno Listiyarti, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esis, hlm. 28

Pengalaman belajar yang diharapkan dimiliki siswa pun akan menjadi sangat lemah. Intinya adalah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan hendaknya berangkat dari perbaikan dan peningkatan kualitas dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif dan efektif.

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.<sup>25</sup>

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga

---

25 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah di antara kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan.

Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan.

Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan dapat digambarkan dalam bentuk spektrum tenaga kependidikan.

Dari gambaran di atas, tampak sekalipun pendidik (guru) yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain yang mendukung.

Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). Karena itu pula, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar.

Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa:

1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Mencermati tugas yang digariskan oleh undang-undang di atas khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sekolah, jelas bahwa ujung dari pelaksanaan tugas adalah terjadinya suatu proses pembelajaran yang berhasil.

Segala aktivitas yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan harus mengarah pada keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh para peserta didiknya.

Berbagai bentuk pelayanan administrasi yang dilakukan oleh para administrator dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru; proses pengelolaan dan pengembangan serta pelayanan-pelayanan teknis lainnya yang dilakukan oleh para manajer sekolah juga harus mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas dan efektif.

Lebih lagi para pendidik (guru), mereka harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan berbagai komponen yang akan terlibat dalamnya. Sungguh suatu tugas yang sangat berat.

Ruang lingkup tugas yang luas menuntut para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan aktivitasnya secara sistematis dan sistemik. Karena itu tidak heran kalau ada tuntutan akan kompetensi yang jelas dan tegas yang dipersyaratkan bagi para pendidik, semata-mata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik jelas telah dirumuskan dalam pasal 24 ayat (1), (4), dan (5) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

## H. Model-Model dalam Mentransformasi Nilai Nasionalisme

Menurut Hans Kohn (1984), nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa.<sup>26</sup> Perasaan mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah airnya.

Dikuatkan lagi dengan pendapat Noor Ms Bakry (2008), nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan dengan rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia.<sup>27</sup>

Sikap nasionalisme harus ditanamkan dan dibentuk dalam diri generasi penerus bangsa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sikap nasional-

---

26 Hans, Kohn, 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahhnya*. Jakarta: Erlangga, hlm. 11.

27 Noor Ms. Bakry, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 90.

isme merupakan suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menanamkan sikap nasionalisme pada generasi muda salah satunya melalui jalur pendidikan.<sup>28</sup>

Nasionalisme yang sehat sebagai modal kultural hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan sebagai strategi penanaman sikap nasionalisme dibentuk melalui model-model pembelajaran dan pendekatan-pendekatan.<sup>29</sup> Dalam mewujudkan sikap nasionalisme pada peserta didik salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarahkan perhatian kepada kesadaran berbangsa dan bernegara.

Menumbuhkan kesadaran sikap nasionalisme pada diri peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui pembelajaran di sekolah yang mengarahkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia

---

28 Sadikin, 2008. *Peningkatan Sikap Nasionalisme melalui Pembelajaran IPS dengan Metode Sosiodrama di SD Cikembulan, Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 18.

29 Tilaar, H.A.R. , 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

yang baik, dapat diandalkan dalam bela negara dan cinta tanah air. Berikut ini merupakan model-model penanaman nasionalisme peserta didik:

### 1. Melalui Muatan Lokal Wawasan Kebangsaan

Penerapan muatan lokal wawasan kebangsaan dalam setiap satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dapat menanamkan sikap nasionalisme pada generasi muda. Dalam panduan kurikulum mata pelajaran wawasan kebangsaan mata pelajaran wawasan kebangsaan merupakan proses dan upaya dengan menggunakan pendekatan belajar CTL untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, dan keterampilan supaya membentuk karakter warga negara Indonesia.

Tujuan dari muatan lokal wawasan kebangsaan adalah mengembangkan nilai-nilai luhur seperti yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Lembaga sekolah memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI.<sup>30</sup>

Dalam panduan kurikulum muatan lokal wawasan kebangsaan tujuan mata pelajaran wawasan kebangsaan

---

30 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, 2012. *Panduan Kurikulum Muatan Lokal Wajib Mata Pelajaran Wawasan Kebangsaan Untuk SMP dan MTs*. Blitar: Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, hlm. 3.

adalah untuk membentuk kompetensi siswa untuk berfikir kritis, kreatif dan rasional. berpartisipasi, bertanggung jawab dan bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri siswa yang berkarakter Indonesia, mengembangkan nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, serta selalu setia dan patuh terhadap ideologi bangsa Pancasila, UUD 1945, dan NKRI yang berbhineka Tunggal Ika.<sup>31</sup>

Penanaman nasionalisme peserta didik melalui mata pelajaran muatan lokal wawasan kebangsaan, dalam pembelajaran menyatu dalam hubungan antara guru dengan siswa, di mana guru berusaha menjadi teladan yang baik dan siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan positif sesuai dengan sikap nasionalisme yang ingin ditanamkan guru melalui mata pelajaran wawasan kebangsaan.

Materi pelajaran wawasan kebangsaan ini dikembangkan dengan cara mengaitkan materi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang dimulai dari lingkungan sekolah, melalui cara ini akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi wawasan kebangsaan.

---

31 *Ibid*, hlm. 2.

## 2. Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT)

Penanaman nasionalisme di sekolah secara optimal melalui pembelajaran pembinaan nilai atau *value clarification technique* (VCT). Sebagai mata pelajaran di sekolah Pendidikan Kewarganegaraan sangat tepat digunakan model pembelajaran VCT.

Menurut Akhmad Djauzak (1966), model pembelajaran VCT merupakan salah satu cara penyampaian materi pembelajaran untuk membina peserta didik agar mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengambil keputusan nilai mana yang akan dipilih secara penuh keyakinan.<sup>32</sup>

Sebagai strategi penanaman nasionalisme model pembelajaran VCT yang diterapkan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengantarkan peserta didik mempunyai keterampilan atau kemampuan menentukan nilai-nilai nasionalisme yang tepat sesuai dengan tujuan hidupnya dan menginternalisasikannya, sehingga nilai-nilai nasionalisme tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku atau bersikap.

Tujuan penggunaan model VCT dalam pembelajaran sebagai penanaman nilai nasionalisme di sekolah antara lain:

---

32 Ahmad Djauzak, dkk., 1966. *Metodik Khusus Pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 29.

- a. Mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai.
- b. Menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun sifat yang positif maupun negatif untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan pencapaian target nilai.
- c. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional (logis) dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban moral.
- d. Melatih siswa dalam menerima/menilai dirinya dan posisi nilai orang lain, menerima serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari.<sup>33</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai nasionalisme, model VCT ini menekankan kepada peserta didik dalam usaha mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri. tujuan model VCT dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme sebagai berikut:

---

33 Tukiran Taniredja, dkk., 2012. *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 88.

- a. Membantu peserta didik untuk menyadari dan mengidentifikasi pentingnya nilai-nilai nasionalisme bagi dirinya sendiri dan bangsa.
- b. Membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini (nilai nasionalisme).
- c. Membantu peserta didik agar mampu menggunakan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, pola tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme.<sup>34</sup>
- d. Proses pembelajaran VCT dalam menanamkan nasionalisme peserta didik mencakup 7 (tujuh) tahap atau aspek yang biasanya digolongkan menjadi tiga tingkat. Ketujuh tahap yang dibagi dalam tiga tingkat tersebut adalah sebagai berikut:

#### **TINGKAT 1: KEBEBASAN MEMILIH**

Pada tingkat ini, terdapat 3 tahap pembelajaran, yaitu:

- a) Memilih dengan bebas.
- b) Memilih dari berbagai alternatif.

---

34 Adisusilo Sutarjo, 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 142.

- c) Memilih setelah melakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat atas pilihannya itu.

#### **TINGKAT 2: MENGHARGAI**

Pada tingkat ini, terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yaitu:

- a) Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya.
- b) Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum.

#### **TINGKAT 3: BERBUAT**

Pada tingkat ini, terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yaitu:

- a) Adanya kemauan dan kemampuan untuk melaksanakannya.
- b) Mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya.<sup>35</sup>

### **3. Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*)**

Model pembelajaran dalam rangka menanamkan nilai nasionalisme pada siswa adalah Model pembelajaran

---

35 Tukiran Taniredja, dkk., 2012, *op.cit.*, hlm. 89-90.

Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*). Model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*) adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Dengan adanya praktik, siswa diberikan latihan untuk belajar secara kontekstual.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Budimansyah, *Project Citizen* adalah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*).<sup>37</sup>

Budimansyah (2009) menegaskan bahwa landasan pemikiran *Project Citizen* terletak pada satu kerangka yang terdiri atas lima bagian tentang gagasan pendidikan dan politik:

*Pertama*, diperlukannya keterlibatan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. *Kedua*, Inti dari Pendidikan Kewarganegaraan kaya akan nilai jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan berwarga negara. *Ketiga*, dengan menggali masalah-masalah yang

---

36 Depdiknas. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 12.

37 Budimansyah, 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 1.

ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka akan mengetahui prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan.

*Keempat, Project Citizen* dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja pradini (berusia sekitar 10-15 tahun) yang mulai bergeser dari berpikir konkret menuju berpikir abstrak. *Kelima, Project Citizen* menganggap siswa sebagai sumber kewarganegaraan yang gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik.<sup>38</sup>

Menurut Budimansyah dan Karim Suryadi (2008), strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi *inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning*, yang dikemas dalam model project ala John Dewey.<sup>39</sup>

Adapun langkah-langkah pembelajarannya ialah sebagai berikut:

- a. Penjelasan secara historis dan nalar nasionalisme Indonesia.

---

38 Budimansyah, "Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)", dalam *Acta Civicus*, Vol. 1, Nomor 2, April 2008, hlm. 182.

39 Budimansyah & Karim Suryadi, 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 25.

- b. Mengidentifikasi masalah krisis nasionalisme dan erosi ideologi dalam masyarakat.
- c. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas.
- d. Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu.
- e. Mengembangkan portofolio kelas.
- f. Menyajikan portofolio.
- g. Melakukan refleksi pengalaman belajar.

Berdasarkan model-model pembelajaran di atas, diharapkan penanaman nasionalisme melalui proses pembelajaran lebih mudah diterima oleh peserta didik sehingga karakter peserta didik secara tidak langsung akan terbentuk melalui kegiatan pembelajaran penanaman nasionalisme bangsa.

Selain itu, diharapkan pula dapat menumbuhkan partisipasi secara aktif, bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## REFERENSI

- Abdul Choliq Murod, "Nasionalisme dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVI, No. 2, 2011, hlm. 48.
- Adisusilo Sutarjo, 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Djauzak, dkk., 1966. *Metodik Khusus Pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud.
- Ali Rohmad, 2009. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.

- Anderson, Benedict, 1999. *Imagined Communities: Reflection on The Origin and Spread of Nationalism. Revised Editon*. London and New York: Verso.
- Asep Hery Hernawan, 2006. *Pengelolaan Kelas*. Bandung: UPI Press.
- Bodine & Crawford, 1994. *Creating the Peaceable School, Comprehensive Program for Teaching Conflict Resolution: Program Guide Champaign*. Illinois: Research Press.
- Budimansyah & Karim Suryadi, 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah, “Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)”, dalam *Acta Civicus*, Vol. 1, Nomor 2, April 2008, hlm. 182.
- Budimansyah, 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bunyamin Maftuh, 2005. “Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas”. Disertasi (tidak diterbitkan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Campbell, *et.al.*, 2002. *Multiple Intelligences: Metode Terbaru Melesatkan Kecerdasan*. Yogyakarta: Inisiasi Press.
- Darmono, 2007. *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Suatu Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Jakarta: Gramedia Widiasmara Indonesia.
- Deddy Mulyana & Jalaludin Rakhmat, 2006. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Depdiknas. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar, 2012. *Panduan Kurikulum Muatan Lokal Wajib Mata Pelajaran Wawasan Kebangsaan Untuk SMP dan MTs*. Blitar: Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar.
- Dwi Siswoyo, dkk., 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Euis Karwati & Doni Juni Priansa, 2014. *Manajemen Kelas*. Bandung: Alfabeta.
- Fajar Kartika, "Gerakan Mahasiswa: Gajah di Pelupuk Mata Tak Nampak", dalam *Info Muria*, Edisi V, Mei-Juli 2011.

- Fisher, Simon, *et.al.* 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Frydenberg, Erica, 2005. *A Life and Legacy of Mediation and Conflict Resolution*. Brisbane: Australian Academic Press.
- Furnivall, J.S., 1967. *Netherland India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: The Cambridge University Press.
- Grendi Hendrastomo, "Nasionalisme vs Globalisasi: Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern, dalam *Jurnal Dimensia*, Volume I, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 4 & 31.
- Gudykunst, Willian, B & Kim, Young Yun, 1992. *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication*. Edisi ke-2. New York: McGraw-Hill.
- H.A.R. Tilaar, 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haidari Nawawi, 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: PT Haji Mas Agung.
- Hall, J. A., "Nationalism: Classified and Explained", dalam *Daudalus*, 122 (3), 1993, hlm. 1-2.

- Hans, Kohn, 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Harun Gafur, 2015. *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus*. Bandung: Rasibook.
- Joesoef, D., 1978. *Normalisasi Kehidupan Kampus dan Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jones, Tricia S. & Kmitta, 2001. *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program*. Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management.
- Kevin McDonough, "Beyond Patriotic Education: Locating The Place of Nationalism in The Public School Curriculum", dalam *Education, Citizenship and Social Justice*, 8 (2), 135–150, 2013, hlm. 143.
- Launa, "Gerakan Intelektual dan Aksi Massa Mahasiswa: Refleksi dan Prospeksi Peran Politik Mahasiswa Era Orde Baru", dalam *Jurnal Widya*, Nomor 183, Tahun 2000, hlm. 32 & 40.
- Lind, M., "In Defence of Liberal Nationalism", dalam *Foreign Affairs*, 73 (3), 1994, hlm. 87-88.
- Muhammad Amin, 1988. *Buku Pedoman Laboratorium dan Petunjuk Praktis Pendidikan IPA Umum (Gen. Science) untuk LPTK*. Jakarta: Depdikbud.

- Mulyasa, 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Naimah, "65 Tahun Dirgahayu Indonesia: Bayang-bayang Gelap Ancaman Disintegrasi Bangsa", dalam *Jurnal UI untuk Bangsa: Seri Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Desember 2010, hlm. 59.
- Noor Ms. Bakry, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novan Ardy Wiyani, 2013. *Manajemen Kelas*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Novitasari Iriane Rawantina & I Made Arsana, "Penanaman Nilai Nasionalisme dan Patriotisme untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Sidoarjo", dalam *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1, Vol. 1: 39-54, 2013, hlm. 50.
- Nuryani Rustaman, 2005. *Strategi Belajar Mengajar Biologi*. Malang: UM Press.
- Parsudi Suparlan, 2002. *Hubungan Antar Suku-bangsa*. Jakarta: YKIK.
- Perkasa, S., "Dari Konflik Ambon hingga Pengusiran Ahmadiyah," dalam [m.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205693](http://m.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205693), diakses pada 12 Maret 2016.

- Rakhmat, J., 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2013.
- Retno Listiyarti, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esis.
- Reva Sonia Izati, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa, dalam *Jurnal PPKn UNJ Online*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 14.
- Reva Sonia Izati, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa", dalam *Jurnal PPKn UNJ Online*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 7.
- Riant Nugroho, 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ritter, Herry, 1986. *Dictionary of Concepts in History*. New York: Greenwood Press.

- Sadikin, 2008. *Peningkatan Sikap Nasionalisme melalui Pembelajaran IPS dengan Metode Sosiodrama di SD Cikembulan, Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Salim HS, Hairus, & M. Ridwan, 1999. *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural*. Yogyakarta: LKiS.
- Sarwono, S.W., 2005. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Smith, Anthony D., 2003. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Terjemahan Frans Kowa. Oxford: Balckwell Publishing Ltd.
- Snyder, Louis, 1954. *The Meaning of Nationalism*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Suharno, "Membangun Kebangsaan Multikultural dari Bawah", tulisan hasil kerjasama FISE UNY dengan SKH Kedaulatan Rakyat dalam rangka Dies Natalis ke-44 FISE UNY, 15 September 2009.
- Suharno, "Urgensi Kebijakan Berwatak Multikultural di Indonesia", disampaikan dalam Konferensi Kewarganegaraan Indonesia Ke-1 di Universitas Negeri Yogyakarta, 19-20 Desember 2015.
- Suparlan, 2008. *Menjadi Guru Efektif*. Jakarta: Grasindo.

- Syaiful Sagala, 2011. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabet.
- Syaifullah Syam, "Pola Adaptasi Mahasiswa Baru PMPKN FPIPS UPI: Studi Analistik", dalam *Jurnal Civicus*, Volume 1, 2005, hlm. 372-382.
- Syamsul Arif, 2005. *Manajemen Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: UGM.
- Tilly, C., "State and Nationalism in Europe 1492-1992", dalam *Theory and Society*, 23 (1), 1994, hlm. 6.
- Tukiran Taniredja, dkk., 2012. *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yuddy Chrisnandi, "Gerakan Mahasiswa (Mengembalikan Ruh Perjuangan Reformasi)", dalam makalah yang disampaikan pada acara *Rembug Mahasiswa & Pemuda se-Indonesia* di Bandung, 12 Februari 2001.



# INDEKS

## A

- Abdul Choliq Murod 162, 163, 185  
Abdurrahman Wahid 49  
Adisusilo Sutarjo 180, 185  
Agoes Salim 54  
Akbar Tanjung 51  
Akhmad Djauzak 178  
Ali Rohmad 148, 149, 185  
Amien Rais 51  
Anderson, Benedict 159, 186  
Asep Hery Hernawan 149, 150, 186  
Ayub Khan 43

## **B**

Boedi Oetomo 26, 159  
Budimansyah 182, 183, 186  
Bunyamin Maftuh 71, 77, 186

## **C**

Chun Doo Hwan 43

## **D**

Dahl, Robert A. 45  
Darmono 152, 187  
Deddy Mulyana 122, 131, 134, 187  
Der Fremde 129  
Doni Juni Priansa 149, 187  
Dwi Siswoyo 21, 187

## **E**

Euis Karwati 149, 187

## **F**

Fajar Kartika 16, 187  
Fisher, Simon 74, 188  
Frydenberg, Erica 78, 188

## **G**

Gerakan Aceh Merdeka 30  
Grendi Hendrastomo 36, 49, 158, 188  
Gudykunst, Willian 129, 188  
Gus Dur 48, 49

## H

Haidari Nawawi 148, 188  
Hall, J. A 161, 188  
Hans, Kohn 174, 189  
Harun Gafur 24, 42, 189  
Hatta 28, 29, 54  
Hobbes, Thomas 45  
Horsman, Mathew 16

## I

I Made Arsana 167, 190  
Indische Partij 26

## J

Jalaludin Rakhmat 122, 131, 134, 187  
Jones, Tricia 76, 189  
Jong Ambon 31, 143  
Jong Celebes 27, 143  
Jong Java 27, 31, 143  
Jong Celebes 27  
Jong Sumatera 143

## K

Kakuei, Tanaka 24  
Karim Suryadi 183, 186  
Ki Hadjar Dewantara 77, 166  
Kim, Young Yun 129, 137, 188  
Korten, David 16

## L

Lind, M. 161, 189  
Locke, John 45  
Luther, Martin King 45

## M

Malari 24  
Marcos, Ferdinand 43  
Marshal, Andrew 16  
McDonough, Kevin 164  
Megawati Soekarnoputri 48, 51  
M. Fatwa 22, 26  
Mindes, Gayle 74  
Mohammad Hatta 29, 54  
Muhammad Amien 154  
Muhammadiyah 31  
Mulyasa 62, 190

## N

Nahdlatul Ulama 31  
Naimah 12, 190  
Nazi 161  
Noor Ms Bakry 174  
Novan Ardy Wiyani 148  
Novitasari Iriane Rawantina 167, 190  
Nuryani Rustaman 154, 190

## O

Ohmae, Kenichi 16  
Organisasi Papua Merdeka 30

**P**

Parsudi Suparlan 144, 190  
 Partai Komunis Indonesia 23  
 Partai Nasional Indonesia 143  
 Perhimpunan Indonesia 143  
 PKI 23  
 PNI 143

**R**

Ramlan Surbakti 72, 191  
 Rengasdengklok 28  
 Republik Maluku Selatan 30  
 Retno Listiyarti 169, 191  
 Reva Sonia Izati 37, 158, 191  
 Reza Pahlevi 43  
 Riant Nugroho 85, 191  
 Ritter, Herry, 157, 191  
 Rousseau, Jean Jacques 45  
 Rudini 24

**S**

Sadikin 175, 192  
 Salim HS 32, 192  
 Sarekat Islam 26  
 Sarwono 71, 192  
 Smith, Anthony 15, 192  
 Snyder, Louis 159, 192  
 Soeharto 17, 23, 24, 28, 40, 43, 46, 47, 48, 56  
 Soekarno 16, 23, 28, 43, 47, 54, 55, 164  
 Soekarno-Hatta 28  
 Soetan Sjahrir 54

STOVIA 26

Suharno 1, 2, 13, 14, 17, 192

Sumpah Pemuda 17, 27, 28, 143

Suparlan 61, 144, 190, 192

Syaifullah Syam 22, 26, 52, 193

Syaiful Sagala 68, 193

Syamsul Arif, 153, 193

## T

Taman Siswa 166

Tan Malaka 54

Tilaar, H.A.R 175

Tilly, C 162, 193

Tjipto Mangoenkoesoemo 54

Tridharma Perguruan Tinggi 154, 155

Tritura 55

Tukiran Taniredja 179, 181, 193

Tuti Bahfiarti 123

## Y

Yuddy Chrisnandi 29, 33, 37, 46, 193

## TENTANG PENULIS



**Dr. Suharno, M.Si.**

**L**ahir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada 17 April 1968. Meraih gelar Sarjana (S1) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan S2 dan S3 Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM).

Doktor Kebijakan Publik ini sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Selain itu, penulis juga mengampu mata kuliah Kebijakan Publik dan Sosiologi Politik, Pengantar Kebijakan Pendidikan, dan Perencanaan Kebijakan Pendidikan Daerah untuk jenjang S1, serta Pendidikan Politik, Manajemen Konflik, serta Pendidikan Demokrasi dan Multikultural untuk jenjang S2.

Suami dari Sri Sajidah, S.Pd. dan ayah dari 5 orang putri ini sudah menulis cukup banyak artikel yang telah dimuat di media massa. Penulis juga telah melakukan serta memimpin berbagai kerja-kerja penelitian, terutama terkait tentang multikulturalisme.

Penulis sering diundang sebagai pemateri ke berbagai seminar atau konferensi, baik taraf nasional maupun internasional, termasuk di Sumatera Barat, Jakarta, Kalimantan Timur, bahkan Kuala Lumpur (Malaysia), Sidney (Australia), serta Fukuoka (Jepang).